

04 Ruang Utama

23TH BPOM

38 Ruang Tamu

Dari Indonesia
untuk Palestina

50 Ruang Belajar

Pesona Alami
Puteri Indonesia



**MENGAWASI
SEPENUH
HATI**



Ilustrasi Cover: Moon, Richardi Putranto

MaPOM

Majalah Pengawasan Obat dan Makanan

Vol.6/No.1/2024

ISSN 2808-4683



Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi majalah dengan bentuk dan cara apapun tanpa izin dari penerbit.



Untuk memperbanyak atau membutuhkan MaPOM dengan jumlah tertentu, **serta saran dan masukan untuk MaPOM**, silakan menghubungi tim redaksi MaPOM lewat *scan barcode* berikut:



Tim redaksi akan memberikan **hadiah menarik** untuk 3 pemberi saran/masukan yang paling kreatif.



Susunan Redaksi

Pengarah

Dr. Drs. Li Rizki Andalusia, Apt., M.Pharm., MARS

Pembina

Drs. Rita Mahyona, Apt., M.Si

Pemimpin Redaksi

Noorman Effendi, SP., M.Si

Tim Redaksi

Bra Rosmalasari, S.Si., Apt., M.K.M.
Hendriq Fauzan Kusafanto, S.Farm., Apt.
Gita Indah Nundyia Sari, S.Farm., Apt.
Fathan Nur Hamdi, S.Sos.
Dian Hermawati, S.Farm., Apt.

Tim Sekretariat

Tri Kuswanto, S.E
Zulfikar Rasyad Ustiyanto, S.Kom
Fadla Utami, S.Ak
Faisal Nur Jabbar, A.Md
Armadita, S.Tr.kom
Farhan Al Hamidy, S.Likom
Dimas Bagus Saputra, A.Md

Tim Penulis

Anggita Tyaswuri, S.Farm
Benny Robin, S.E
Chandra Windu Adnanunggar, S.Ikom
Desti Rachmadyah Nanda Setiawan, S.Farm., Apt.
Dewi Oktaviani, S.Ikom
dr. Mayemi Mutiara Situmorang, M.So
Fadlan Khaerul Anam, S.Sos
Fauziah Ridho, S.Farm., M.Si
Intan Julita, S.Farm., Apt.
Jerry Voldo Febian Manurung, S.Farm., Apt.
Lia Ardiana Kartika Nugraheni, S.Si, Apt., M.Si
Mauli Muhammad Adib, S.Sos.
Moch. Rahard Putranto, S.Ars
Muhammad Rizky, S.E
Muzenah, S.Farm., Apt.
Nelly Luthiani Rachman, S.Sos
Pesta S.P. Sibarani, S.Farm., Apt., MPP
Qori Yasinta, S.Farm., Apt.
Randi Dian Saputra, S.Si
Ratna Widi Astuti, GF, Apt, MSc.
Sery Marlanty, S.Farm., Apt.
Theresia Ratna Prasetyaningtyas
Yanuar Rahman, S.Ikom
Zain Fadhlurrahman, S.TP

Alamat

Jl. Percetakan Negara Nomor 23,
Jakarta - 10560, Indonesia
Phone: (+62)21 4244691/42883309/42883462
FAX: (+62)21 4269333
SMS: (+62) 8121 9999 533

Salam Sehat

Telah 23 tahun BPOM menjalankan amanah pengawasan obat dan makanan. Berbagai tantangan dan tempaan, menjadi motivasi bagi BPOM untuk terus tumbuh dan makin kuat. Berdiri mandiri dan menunjukkan eksistensi sebagai lembaga pengawas yang kuat dan tangguh, serta terdepan dalam perlindungan masyarakat Indonesia.

Untuk mencapai visi mewujudkan obat dan makanan aman, bermutu, dan berdaya saing, BPOM menjalankan tugas dengan penuh dedikasi. Karena hanya dengan melakukan tugas pengawasan sepenuh hati, visi tersebut dapat terwujud dengan sempurna.

Pengawasan sepenuh hati yang dilakukan BPOM adalah sajian utama yang ingin disampaikan MaPOM edisi kali ini. Dalam rubrik Ruang Utama, diulas lengkap kinerja BPOM di usianya ke-23. Hal ini sebagai momentum untuk refleksi dan evaluasi dalam upaya meningkatkan kinerja serta kolaborasi.

Rubrik Ruang Utama juga membahas proses perencanaan kerja BPOM yang sistematis dan komprehensif. Tujuannya untuk merancang pengawasan obat dan makanan guna mendukung pertumbuhan industri yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu juga, dibahas mengenai hasil intensifikasi pengawasan pangan selama Ramadan dan jelang Idulfitri 2024.

Mengulas kosmetik aman, obat tetes herbal, suplemen kesehatan untuk tumbuh kembang anak, dan obat untuk swamedikasi adalah beberapa materi yang dapat dipelajari pembaca di rubrik Ruang Belajar. Dalam rubrik yang sama, pembaca akan dikenalkan dengan Nuansa (Naik Kelas Usaha Mikro Kecil Obat Bahan Alam Indonesia). Ini adalah program BPOM yang bertujuan agar pelaku usaha mikro obat tradisional (UMOT) dan usaha kecil obat tradisional (UKOT) dapat meningkatkan daya saing produknya melalui penerapan cara pembuatan obat tradisional yang baik (CPOTB) secara *full aspect*.

Pada rubrik Jendela, pembaca akan memperoleh informasi tentang upaya BPOM dalam memastikan kemandirian dan *sustainability* darah lokal dan produk derivat plasma darah yang aman, bermutu, dan andal. Pembaca juga akan diajak mengenal Komnas Penilai Obat yang memegang peran vital dalam memastikan setiap obat yang disetujui BPOM aman dan bermanfaat bagi masyarakat.

MaPOM edisi ini juga menceritakan posisi istimewa Palestina di hati bangsa Indonesia. Bagaimana Indonesia secara konsisten mendukung perjuangan Palestina untuk meraih kemerdekaan dan kedaulatan penuh sebagai sebuah negara.

Tak kalah seru adalah pembahasan tentang BERPENDAR. Inovasi BBPOM di Yogyakarta dalam program pendampingan UMKM melalui kolaborasi pentahelik yaitu unsur pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat dan media. Inovasi ini bertujuan untuk meringankan beban pembiayaan pelaku usaha, pendampingan yang terprogram, dan mempercepat proses pendaftaran produk sampai terbit nomor izin edar.

Pada kesempatan ini, segenap awak redaksi MaPOM mengajak pembaca untuk menjalankan tugas dengan penuh dedikasi. Apapun tantangan yang kita hadapi, akan dapat kita lewati selama itu bekerja sepenuh hati. ■

Pemimpin Redaksi MaPOM



BERANDA 01

HALOBPOM 03

RUANG UTAMA 04

Senayan Membiru
Lentingkan Semangat Baru
Rakernas BPOM 2024
Rancang Pengawasan Obat dan Makanan
Jamin Keamanan Pangan
Di hari yang Fitri

RUANG BELAJAR 16

Awas Obat Tetes Mata Herbal
Bisa Sebabkan Kebutaan
Pesona Alami Putri Indonesia
Kenalkan Kosmetik Aman pada Generasi Muda
Suplemen Kesehatan
Jalan Pintas untuk Tumbuh Kembang Anak?
Memahami Tes Narkoba
Jangan Khawatir Jika Hasilnya Positif
NUANSA (Naik Kelas Usaha Mikro Kecil Obat
Bahan Alam Indonesia)

JENDELA 26

23 Tahun Peran Penting
Tim Komnas Penilai Obat
BPOM Bangun Kerjasama Internasional
Produksi ASEAN Reference Substances
Pemanfaatan Media Sosial oleh BPOM
Strategi dan Implementasi untuk Keterlibatan Publik yang Optimal
Menuju Kemandirian Produk Obat Derivat Plasma (PODP)
Melalui Lokakarya Penyusunan Plasma Master File
Kolaborasi Capai Patient Safety

BINGKAI 40

BPOM Raih 4 Penghargaan
Pada Ajang The 9th PRIA 2024

RUANG TAMU 44

Dari Palestina untuk Indonesia

GALERI 48

Dokumentasi Kegiatan Strategis

DAPUR UMKM 50

Berpendar
Bersama Pendampingan UMKM untuk Memperoleh Izin Edar

RUANG KERJA 54

Jangan Asal Jastip Makanan Viral
1 Ton Milk Bun Asal Thailand Dimusnahkan
Ingin Cantik Malah Bikin Sick

FILLER 58

Potret Perbatasan Darat Indonesia - Malaysia



4



18



32



44

Tanya HALOBPOM:

Bagaimana prosedur pemasukan kosmetik dari luar negeri untuk tujuan penggunaan pribadi melalui barang bawaan penumpang/jasa pengiriman?

HALOBPOM Menjawab:

Pemasukan kosmetik dari luar negeri untuk tujuan penggunaan pribadi melalui barang bawaan penumpang/jasa

pengiriman dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- 1) Mengisi formulir pemberitahuan pemasukan obat dan makanan yang disediakan oleh Bea Cukai; dan
- 2) Membawa identitas diri, sebagaimana yang tercantum pada Lampiran II Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2023. ■

Tanya HALOBPOM:

Berapakah jumlah maksimal pemasukan barang kosmetik impor yang diperbolehkan untuk tujuan penggunaan pribadi melalui bawaan penumpang/jasa pengiriman?

HALOBPOM Menjawab:

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2023 disebutkan bahwa batasan jumlah barang impor untuk tujuan penggunaan pribadi **maksimal 20 pcs per penumpang/penerima.** ■

Tanya HALOBPOM:

Apakah produk kosmetik yang berasal dari bahan alam tetap wajib terdaftar di BPOM?

HALOBPOM Menjawab:

- Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika disebutkan bahwa pelaku usaha wajib menjamin kosmetik yang diproduksi dan/atau yang diimpor untuk diedarkan di wilayah Indonesia memenuhi kriteria keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan, dan klaim.
- Untuk menjamin kosmetik yang diedarkan di wilayah

Indonesia memenuhi kriteria tersebut, pelaku usaha wajib mengedarkan kosmetik yang telah memiliki izin edar berupa notifikasi. Oleh karena itu, kosmetik yang berasal dari bahan alam dan diproduksi untuk diedarkan di wilayah Indonesia **wajib terdaftar/ternotifikasi di BPOM.**

- Persyaratan teknis bahan kosmetik termasuk bahan kosmetik yang berasal dari bahan alam dapat mengacu pada:
 - a. Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan BPOM Nomor 17 Tahun 2022.
 - b. Keputusan Kepala BPOM Nomor 479 Tahun 2023 tentang Perubahan Bahan yang Dizinkan dalam Kosmetik. ■

Tanya HALOBPOM:

Apakah krim racikan yang diperoleh dari klinik kecantikan aman digunakan?

HALOBPOM Menjawab:

- Definisi kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah

penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

- Krim racikan dari dokter praktik di klinik kecantikan dibuat berdasarkan **hasil konsultasi dan resep dari dokter**, kemudian diracik oleh apoteker di apotek berdasarkan resep dokter. Keamanan produk sepenuhnya merupakan tanggung jawab dokter di klinik tersebut.
- Krim racikan yang mengandung bahan obat dan bertujuan untuk menyembuhkan, tidak termasuk kategori kosmetik namun termasuk **kategori obat.** ■

Tanya HALOBPOM:

Apakah reaksi kemerahan dan gatal setelah penggunaan suatu produk kosmetik disebabkan karena produk yang tidak aman?

HALOBPOM Menjawab:

- Setiap individu memiliki reaksi yang berbeda terhadap kosmetik yang digunakan. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk mengenali kondisi kulitnya

sendiri. Reaksi iritasi yang timbul setelah penggunaan kosmetik kemungkinan disebabkan reaksi alergi kulit akibat ketidakcocokan kulit terhadap bahan yang ada pada kosmetik. Disarankan untuk tidak melanjutkan penggunaan produk kosmetik tersebut dan berkonsultasi ke dokter jika reaksi alergi berlanjut.

- Perusahaan pemilik nomor notifikasi, wajib melaporkan hasil monitoring efek samping kosmetika (MESKOS) kepada Direktorat Pengawasan Kosmetik melalui email laporkosmetik@pom.go.id atau meskos.bpom@gmail.com. ■



Oleh : Fadian Khaerul Anam
Editor : Fathan Nur Hamidi

Senayan Membiru, Lentangkan Semangat Baru

Dari senayan membiru, kembali ke ruangan dengan lampu-lampu, dan lalu menjelajah dengan "mesin waktu". Dengan sosok BPOM yang seperti apa, kita akan bertemu?

Lautan biru berhias awan menaungi area Senayan pagi itu. Ada warna biru lainnya yang tampak menepok di antara semarak warna pakaian olahraga warga ibu kota. Makin dekat, makin terlihat lautan manusia berkaos biru melangkah ke satu titik tuju. Tersepat di dada kirinya lambang BPOM. Lautan manusia

berkaos biru itu saling bertegur sapa, melempar senyum, bertanya kabar, meriah dengan canda tawa anak-anak yang mereka ajak. Mereka sedang bersiap untuk *fun walk* dalam rangka memperingati hari jadi BPOM yang ke-23 pada 31 Januari 2024.

Matahari mulai naik ke tahtanya, Senayan makin hangat suasanya.

Lautan manusia berkaos biru itu mulai berisik bak Paskibra. Baris bersiap di gerbang pintu masuk, bertuliskan "Kolaborasi Negeri Hingga Pelosok Negeri untuk Lindungi Masyarakat" yang menjadi tema hari ulang tahun (HUT) BPOM ke-23. Lautan manusia itu mengangkat papan-papan putih bertuliskan ragam slogan. "Oek izin

edar di ponsel pintar mu dengan BPOM Mobile", begitulah salah satu slogan yang muncul. Rupanya papan putih tersebut akan diarak keliling, mengirim pesan edukasi untuk warga ibu kota.

Dua jawara Betawi, berbaju hitam dan merah, mengenakan sabuk hijau, memalangi arakan itu. Jawara mulai saling berbalas pantun bertukar seloroh. Tiba saatnya Ptt. Kepala BPOM, L. Rizka Andalusia berkelakar pantun: "buah mangga buah kweni, makannya tergari-gari, kalo bukan acara jalan sehat di sini, ga mungkin aye dan rombongan datang kemari". Pantun itu disambut sorak sorai barisan ASN BPOM berkaos biru yang siap jalan santai sambil mengarak papan slogan. Langkah sepatu mulai riuh, tanda jalan santai dimulai, mengambil rute menuju Gelora Bung Karno, melintasi Patung Bung Karno yang berdiri tegak menghadap gedung pencakar langit Senayan, melintasi Hutan Kota dan kembali ke gerbang pintu.

Tak terasa 2,2 kilometer sudah dilalui para ASN BPOM mengikuti *fun walk*. Leleh mereka disambut oleh lambai tangan dua maskot BPOM ODI dan ondel-ondel bersolek baju jingga yang bersiap di pintu gerbang. Keringat

yang berouduuran diharap bangkitkan semangat olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehat yang tengah dibangun di lingkungan kerja BPOM. Kegiatan olah raga telah membudaya di BPOM dengan pelaksanaan Hari Krida setiap Jumat pagi. Arakan tadi diharap mempererat rasa kebersamaan keluarga besar BPOM dan para mitra. Slogan-slogan yang dibawa diharap membekas di mata dan pikiran warga ibu kota yang berolahraga.

Lengan baju para peserta mulai ditarik, terasa surya makin terik. Gelegar suara sepiker memecah riuh celoteh para peserta yang baru selesai *fun walk*, tampaknya acara dilanjutkan. Berjajar di panggung utama Ptt. Kepala BPOM dan para tamu undangan memegang botol jamu, promosisikan gerakan jamu warisan nusantara (JAWARA). Kini, mata para peserta tertuju dengan seksama ke panggung siap menyimak pesan yang akan disampaikan Ptt. Kepala BPOM. Sambil memegang erat sepiker, dia menjelaskan kolaborasi dengan pemangku kepentingan sangat penting agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa dapat tercapai optimal.

Pilar pengawasan obat dan makanan yang efektif setidaknya memerlukan peran pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Tak kalah neoris, laki-laki berkacamata tampak segar bugar yaitu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memulai sambutannya. Sorot matanya bersahut dengan pesannya tentang BPOM, BPUS, dan Kementerian Kesehatan bertugas melayani kesehatan masyarakat. Masyarakat mesti mudah mendapat pelayanan, mesti bagus pelayanannya, dan mesti murah pelayanannya. Tak lama pandangannya mengarah ke langit terik. Dia hendak mengakhiri sambutannya dengan harapan di tahun berikutnya BPOM bisa jauh lebih baik untuk memberikan akses obat dan makanan yang mudah, bagus, dan murah.

Panaanya cuaca Senayan tak menurunkan ritme debar jantung para peserta hari itu. Bagaimana tidak berdebar, BPOM akan umumkan penghargaan pada lima kelompok mitra, yaitu masyarakat; mitra internasional dan kerja sama dalam negeri; apotek yang aktif melakukan komunikasi, informasi; dan edukasi; media; serta



Ptt. Kepala BPOM Ri menyemangati para ASN BPOM di acara Town Hall Meeting (31/1/2024).



Tampilan Gedung Merah Putih BPOM dari samping (16/03/2022)

pemerintah daerah tematik. Panggung makin berwarna saat para pemenang penghargaan dengan baju *training* dan baju pramuka naik ke panggung. Mereka adalah fasilitator keamanan pangan terbaik tingkat nasional, mahasiswa program Pangan Aman Goes to Campus – Merdeka Belajar Kampus Merdeka terbaik, anggota SAKA POM terbaik, apotek yang melakukan edukasi *AntiMicrobial Resistance* (AMR) dan Ayo Buang Sampah Obat dengan Benar (ABSO).

Senyum simpul tergambar di wajah para pemenang dari kalangan jurnalis dan pemerintah daerah. Mereka berbangga hati karena karya dan kinerja mereka mendapatkan tempat yang layak. Terdapat 6 kategori penghargaan media, yaitu The Best Online Media, The Best Printed Media, The Best Electronic Media, The Best Journalist-Online Media, dan The Best Journalist-Printed Media. Sementara untuk pemerintah daerah, penghargaan untuk kabupaten/kota yang

melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar dan pemerintah pionir dan konsisten dalam mendukung penerapan cara distribusi obat yang baik.

Sisi kanan panggung dipenuhi orang mengantri. Antrian ini tak sabar mengunjungi *stand* produk unggulan mitra usaha mikro, kecil, dan menengah binaan BPOM. Expo UMKM diikuti oleh 16 UMKM kosmetik, 6 UMKM obat bahan alam, dan 6 UMKM pangan olahan. Selagi antri, peserta lainnya duduk santai di rumput sambil menikmati tarian para ASN BPOM berompi warna khaki dengan topi dari beragam pakaian tradisional berbagai daerah. Peserta lain mendekat ke panggung dan mulai membuka payung untuk menghalau panas terik. Ada juga yang khusyuk merekam tarian dengan ponsel mereka.

Refleksi Kobarkan Semangat!

Kita harus mundur dulu, ke waktu yang telah berlalu. Dari Senayan yang terik, berpindah masuk ke dalam gedung

bercat putih dengan gagah bertuliskan "Gedung Bhineka Tunggal Ika". Tak ada matahari, namun ada lampu-lampu menguning di sana dengan karpet merah bermotif bunga dan tembok-tembok yang diselengi hiasan batik. Tak ada lautan biru, yang ada para ASN BPOM tampil periente dengan kemeja putih bersaku kanan kiri dan jahitan logo BPOM.

ASN periente dengan celana warna khaki duduk rapi siap mengikuti kegiatan *Town Hall Meeting*, Rabu (31/01/2024). Di depan, meja-meja melingkar mulai diisi oleh Plt. Kepala BPOM bersama Kepala BPOM dari masa ke masa (Kustantinah dan Roy Sparringa). Nampak juga para pimpinan di BPOM yang telah purna tugas seperti Suratmono, Ondri Dwi Sampurno, dan A. Retno Tyas Utami.

Plt. Kepala BPOM meraih sepeker, mulai memantik benak peserta dengan sebuah refleksi. "Cobalah kita melihat pada diri kita masing-masing. Apakah kapasitas saya ini masih bisa ditingkatkan? Apa yang bisa saya berikan untuk negara? Yang perlu kita tingkatkan kapasitas kerja kita untuk negara? Teman-teman masih muda-muda. Terus berpikir, terus berinovasi, terus memikirkan apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita berikan untuk negara," demikian refleksi Plt. Kepala BPOM.

Melanjutkan refleksinya, dia mengandalkan usia 23 tahun sebagai remaja yang matang. Usia ini diibaratkan sebagai tahap remaja yang harus mulai menentukan hidupnya sendiri. Untuk BPOM, usia ini adalah saatnya untuk tinggal landas. BPOM siap berdiri mandiri dan menunjukkan eksistensi sebagai lembaga pengawas yang kuat dan tangguh, serta terdepan dalam perlindungan masyarakat.

Suka duka mulai menjalar pada tiap kalimat refleksi yang sedang disampaikan. Sambil berkaca-kaca, Rizka berkisah dalam 23 tahun perjalanan BPOM banyak peristiwa telah dilalui. Baik pengalaman yang indah dan mengesankan, juga yang berat dan menyedihkan. ASN BPOM telah mengeluarkan seluruh daya dan upaya untuk menghadapi pandemi COVID-19. Sesekali beliau menatap wajah syahdu ASN BPOM yang hadir secara daring lewat zoom. Perempuan kelahiran

Surabaya ini menyemangati seluruh ASN BPOM dan meyakinkan bahwa pengalaman itu membuat mereka harus lebih erat dalam memperkuat barisan, melaksanakan berbagai upaya terobosan dan inovasi.

Raut wajahnya kini terlihat optimis, saat berdiskusi tentang unit pelaksana teknis (UPT) BPOM. Peraih gelar Doktor dari Universitas Gadjah Mada ini menyebutkan bahwa 76 UPT BPOM yang berada hingga di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) menunjukkan negara telah hadir melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Kehadiran UPT lebih dekat dengan masyarakat ini membuka peluang lebih luas untuk BPOM meningkatkan kolaborasi dan kerja sama yang efektif dengan pemangku kepentingan di daerah.

Kalau Senayan dihias dengan simpul senyum para penerima penghargaan untuk mitra BPOM, temaram lampu-lampu Gedung Bhineka Tunggal Ika dihias simpul senyum ASN BPOM. Bagaimana tidak bahagia, Plt. Kepala BPOM memberikan penghargaan dan apresiasi kepada unit kerja dan UPT BPOM, termasuk pegawai BPOM atas berbagai kinerja dan kontribusi yang diberikan kepada BPOM dan masyarakat. Kepala unit kerja dan UPT juga diajak berdiskusi dalam acara *Leader's Dialogue* untuk membahas isu dan permasalahan strategis yang menjadi tantangan pengawasan obat dan makanan.

Mengenang Masa Kelabu

Kisah di atas tampaknya hanya tentang suka cita. Padahal, BPOM juga kerap dihadapkan banyak tantangan. Pandemi COVID-19 yang datang menjadi ujian terhebat tidak hanya bagi dunia, tapi juga Indonesia, termasuk BPOM. Virus baru yang menghantam peradaban manusia membuat para ilmuwan berpikir keras mencari obat penawar. Pada 31 Maret 2020, BPOM menetapkan buku pedoman obat dalam penanganan COVID-19 yang terdiri atas langkah strategis dalam penanganan obat COVID-19; informasi obat COVID-19 di Indonesia; pedoman pelayanan publik di bidang obat dalam kondisi pandemi COVID-19; dan pedoman pengawasan

pemasukan obat COVID-19 melalui jalur khusus.

Pada Juni 2020, BPOM memutar "akal" untuk mencari solusi supaya bisa tetap melayani masyarakat. BPOM merumuskan Sistem Kerja dalam Tata Normal Baru di lingkungan BPOM. Sistem ini meliputi penyesuaian mekanisme kerja, manajemen sumber daya manusia (SDM), dukungan sarana dan prasarana, serta dukungan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Pemberlakuan sistem kerja BPOM terus diperbarui mengikuti kebijakan pemerintah pusat dalam penanganan COVID-19.

Semua garda disiapkan BPOM untuk melayani negeri di masa sulit. Satgas COVID-19 Internal BPOM dibentuk dalam upaya mempercepat akses obat untuk pengobatan COVID-19. Sejumlah laboratorium biologi molekuler milik BPOM yang tersebar di Indonesia disiapkan untuk melakukan pemeriksaan PCR dan swab test kepada seluruh pegawainya.

Pada Desember 2020, pesawat Garuda Indonesia mendapat mandat mengangkut vaksin, muatan spesial untuk menghadapi pandemi COVID-19. Vaksin dikirim dari Bandara Beijing Capital International. Setelah terbang sekitar 6 jam, pesawat mendarat di Bandara Soekarno Hatta. Pemberian vaksin diyakini menjadi penentu (*game changer*) pemulihan kesehatan dan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19. BPOM melakukan pengambilan sampel dan pengujian mutu pada vaksin tersebut setibanya di Bandung. Perjalanan BPOM mengarungi samudera cobaan di masa pandemi, dapat dilihat di ilustrasi di bawah ini.

Arah Masa Depan

Di usianya sekarang, BPOM memiliki lebih dari 4.000 orang pegawai, fasilitas gedung pelayanan publik, laboratorium, serta sarana dan prasarana lainnya yang tersebar di 33 provinsi dan 40 kabupaten/kota di Indonesia. Gedung pelayanan publik BPOM digunakan untuk memberi layanan registrasi obat dan makanan sebelum beredar, layanan ekspor impor obat dan makanan, dan layanan pengaduan masyarakat.

BPOM sedang mempersiapkan diri untuk memperkuat peran regulatori

sebagai pengawas obat dan makanan yang berdaya saing internasional dengan cara masuk sebagai otoritas yang terdaftar dalam WHO Listed Authority (WLA). Sistem farmakovigilans yang terstruktur mulai dari tingkat nasional, subnasional, sampai fasilitas pelayanan kesehatan menjadi salah satu penilaian WLA dalam fungsi farmakovigilans yang harus terpenuhi. Dengan WLA, akan terjadi peningkatan kepercayaan terhadap produk obat/vaksin yang diproduksi Indonesia. Indonesia juga dapat menjadi rujukan aktivitas regulatori bagi otoritas negara lain.

Dalam reformasi birokrasi (RB), BPOM meraih indeks RB tahun 2023 sebesar 89,12 atau "A-" dengan predikat "Memuaskan dengan Catatan". BPOM juga telah berkontribusi pada 6 RB Tematik dengan peran sebagai *supporting agency* untuk 4 tema, yaitu Pengentasan Kemiskinan, Realisasi Investasi, Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, dan Pengendalian Inflasi. Sedangkan pada tema Digitalisasi Administrasi Pemerintahan dalam Penanganan Stunting, BPOM berperan sebagai *implementing agency* sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Saat ini, kita sedang menghadapi *mega project* Ibukota Nusantara. Jika kita bayangkan, bangunan seperti apa yang akan dibangun untuk kantor BPOM di sana? Tentunya melayani masyarakat adalah ruh dari semua desain konstruksi bangunan BPOM di IKN kelak. Internet hari ini juga dibanjiri dengan berita hoaks, akun-bot, buzzer, akankah website BPOM bisa menyaingi *engagement* mereka? Pastinya citra digital BPOM akan terus berubah. Chat GPT, Google AI, Microsoft Bing, mengubah pola pencarian pengguna internet. Apakah informasi BPOM akan menjadi acuan mesin pencarian kecerdasan buatan itu untuk memberikan informasi pada penggunaanya?

Menghadapi ini semua, pesan Soekarno tampaknya cocok untuk dipegang oleh BPOM: "Bagai rotan, aku melengkung, tidak patah!". Artinya di awal BPOM mungkin berat menghadapi itu semua. Namun, bukan berarti BPOM kalah, tapi menunggu waktu saja BPOM akan hadapi itu semua. ■



Perjalanan BPOM Saat COVID-19



2020

Maret

lintasan waktu

Peran BPOM sangat penting dalam ketersediaan obat dan vaksin COVID-19 sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam percepatan penanganan pandemi COVID-19.

Kesehatan merupakan prioritas utama untuk segera dipulihkan, agar bisa mendukung kegiatan ekonomi yang juga harus terus berjalan.

20/03

Presiden membentuk Gugus Tugas COVID-19

02/03

Presiden Joko Widodo menjelaskannya temuan dua warga RI terinfeksi virus COVID-19.

19/03

Rapat Terbatas Pertama dengan Presiden terkait COVID-19

April

04/04

Rapat Terbatas Gugus Tugas COVID-19

07/04

Launching Informatorium Obat COVID-19 Indonesia

30/04

Peluncuran buku edukasi COVID-19

Mei

19/05

Portemuhan dengan Kepala BINP

20/05

Pemeriksaan Lab COVID-19



2020

2022

2023

Januari

10/01

Vaksin COVID-19 Dosis Booster/ Lanjutan

Februari

07/02

Penyorotan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Vaksin Merah Putih

Juni

09/06

Kick Off Uji Klinik Fase 3 Vaksin COVID-19 BUMN

27/06

Kick Off Uji Klinik Fase 3 Vaksin Merah Putih

September

30/09

Penerbitan emergency use authorization (EUA) Vaksin Indovac dan Vaksin AWeona

Oktober

07/10

Pemeriksaan pabrik PT Etana Biotechnologies Indonesia oleh Presiden

13/10

Peluncuran dan Penyuntikan Perdana Vaksin IndoVac

November

04/11

Penerbitan Vaksin Inovac

Mei

30/05

Vaksinasi Massal Inovac

21/06

Indonesia beralih dari pandemi menuju endemi



Presiden Joko Widodo resmi mencabut status pandemi COVID-19 menjadi endemi COVID-19 di Indonesia.

2022

2023



Rakernas BPOM 2024: Rancang Pengawasan Obat dan Makanan

Dukung Pertumbuhan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan

Oleh : Muzenah

Editor : Fathian Nur Hamidi

Perencanaan kinerja memegang peranan penting untuk menentukan keberhasilan suatu organisasi. Karena itu merancang program kinerja pengawasan obat dan makanan suatu keniscayaan. Ragam tantangan yang kompleks perlu dipecahkan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan mendukung pertumbuhan industri farmasi dan pangan olahan yang inklusif dan berkelanjutan.



Pdt. Kepala BPOM L. Rizka Andalusia bersama pimpinan tinggi madya memberikan arahan pada Rakernas BPOM 2024, Semarang (26/03/2024).

Dalam suatu organisasi, perencanaan kinerja merupakan suatu proses yang berperan penting untuk pencapaian tujuan organisasi. Benjamin Franklin mengatakan *"if you fail to plan, you plan to fail"* artinya jika kita gagal dalam merencanakan maka sejatinya kita sedang merencanakan kegagalan itu sendiri.

Jika menilik Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Sesuai amanah UU tersebut,

kementerian/lembaga wajib menyusun Rencana Strategis K/L sebagai dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 tahunan dan Rencana Kerja K/L sebagai dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun.

Meskipun penting, perencanaan seringkali dihadapkan pada tantangan seperti ketidakpastian lingkungan, perubahan cepat dalam teknologi, dan resistansi dari dalam organisasi. Oleh karena itu, perencanaan harus fleksibel dan adaptif terhadap kondisi yang berubah.

Rapat Kerja Nasional BPOM 2024

Untuk mendukung proses perencanaan yang sistematis dan komprehensif, BPOM setiap tahunnya

menyelenggarakan Rakernas sebagai forum akbar konsolidasi perencanaan kinerja BPOM. Dalam acara ini, Pdt. Kepala BPOM, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, pimpinan unit kerja pusat (UKP) serta seluruh pimpinan unit pelaksana teknis (UPT) dari penjuru Indonesia duduk bersama untuk membahas berbagai program prioritas serta target kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan BPOM.

Pada 2024, Semarang dipilih sebagai lokasi pertemuan tersebut. Dalam pertemuan tersebut, Pdt. Kepala BPOM serta seluruh pimpinan satuan UKP dan UPT di BPOM menyepakati target rincian output UPT tahun 2024.

Narasumber dari beberapa kementerian/ lembaga, antara lain Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian PANRB serta Kementerian Kesehatan turut hadir untuk memperkaya perspektif dan berbagi gagasan guna mendorong kemajuan pengawasan obat dan makanan yang selaras dengan kebijakan nasional.

Dalam arahannya, Plt. Kepala BPOM, L Rizka Andalusia menggarisbawahi berbagai isu strategis yang perlu dikawal dalam perencanaan BPOM ke depan. Pertama, penyusunan Grand Design Penguatan Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan sebagai *backbone* pengawasan. Kedua, evaluasi dan perbaikan manajemen sampling obat untuk menghasilkan indikator yang representatif. Ketiga, peningkatan kualitas layanan publik BPOM.

Plt. Kepala BPOM juga menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja realisasi anggaran BPOM tahun 2023 sebesar 99,63% dan berada di peringkat ke-4 dari 84 kementerian/

lembaga serta capaian Indeks Reformasi BPOM tahun 2023 yang telah mencapai 89,12 dengan predikat "Memuaskan".

"Apresiasi kepada seluruh jajaran BPOM yang telah bersinergi sehingga kita dapat meraih capaian yang sangat baik ini. Capaian ini diharapkan agar terus dapat dipertahankan dan ditingkatkan guna penguatan pengawasan obat dan makanan serta menjadi motivasi untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan publik secara prima kepada masyarakat," ujar Plt. Kepala BPOM.

BPOM terus berinovasi melalui berbagai program dan kegiatan strategis dalam rangka peningkatan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa secara inklusif. Di antaranya dengan berkolaborasi bersama seluruh *stakeholders* terkait serta secara berkelanjutan.

Dukung Pertumbuhan Industri

Rakernas BPOM menitikberatkan pada perbaikan perencanaan kinerja



“Penyusunan program dan kegiatan 2025 perlu menekankan inovasi dalam rangka penyempurnaan bisnis proses serta percepatan pelaksanaan kinerja BPOM yang mampu memberikan dampak positif yang nyata di Masyarakat
- Plt. Kepala BPOM, L Rizka Andalusia -

Isu yang Perlu Dikawal dan Menjadi Pertimbangan Perencanaan ke Depan

- ISU 01**  **Grand Design Penguatan Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan.**
- ISU 02**  **Penyempurnaan Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) sebagai *tools* pelaporan hasil pengawasan obat dan makanan yang andal dan tepercaya.**
- ISU 03**  **Evaluasi dan perbaikan manajemen *sampling* obat dan makanan untuk menghasilkan indikator yang representatif.**
- ISU 04**  **Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang lebih terintegrasi melalui konsolidasi sehingga dapat meningkatkan efisiensi anggaran.**
- ISU 05**  **Percepatan perizinan melalui simplifikasi dan deregulasi (penyederhanaan proses bisnis).**
- ISU 06**  **Integrasi satu portal untuk seluruh sistem yang ada di BPOM.**

ke depan, khususnya perencanaan kinerja 2025 melalui perumusan arah kebijakan strategis. Berbagai program dan kegiatan prioritas dirumuskan guna mendukung peningkatan kinerja pengawasan obat dan makanan bagi masyarakat. Implementasi program kinerja pengawasan obat dan makanan dilaksanakan oleh UKP dan UPT BPOM seluruh Indonesia.

Plt. Kepala BPOM menyampaikan 8 arah kebijakan BPOM 2025 sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan serta menentukan prioritas yang tepat sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional. Arah kebijakan BPOM tersebut diharapkan mampu mendorong penguatan pengawasan obat dan makanan serta pertumbuhan industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Berbagai program prioritas dirumuskan untuk mencapai hal tersebut yang selanjutnya akan dikawal.

BPOM terus berkomitmen meningkatkan pertumbuhan industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Berdasarkan data BPOM 2023, tercatat



sebanyak 197.816 izin edar produk sediaan farmasi dan pangan olahan diterbitkan oleh BPOM. Selain itu, pada 2023 BPOM melakukan pendampingan terhadap 1.074 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk pemenuhan standar keamanan dan mutu produksi. Kinerja pada 2023 yang sudah baik ini mencetuskan semangat jajaran BPOM untuk meningkatkan kinerjanya di tahun-tahun mendatang.

Berbagai program prioritas dirumuskan khususnya dalam mendukung arah kebijakan peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha. Di antaranya keberpihakan terhadap UMKM serta peningkatan kualitas layanan publik obat dan makanan. Realisasinya melalui peningkatan layanan registrasi sediaan farmasi dan pangan olahan, peningkatan sertifikasi dalam mendukung penzinaan berusaha, pendampingan uji klinik dan pra klinik, pendampingan hilirisasi hasil riset serta *coaching clinic*/pendampingan kepada pelaku usaha obat dan makanan.

Selain itu, peningkatan pelayanan publik melalui integrasi layanan di Mal Pelayanan Publik secara lebih menyeluruh juga akan menjadi prioritas BPOM ke depan. Harapannya jangkauan layanan BPOM akan semakin lebih luas dalam mendukung pertumbuhan industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Hal tersebut juga sebagai upaya BPOM dalam menjawab ekspektasi masyarakat terhadap layanan publik BPOM yang semakin lebih baik.

Penyusunan program dan kegiatan sejatinya harus berorientasi pada publik. "Masyarakat kita memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap layanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Selain kualitas dan waktu, aksesibilitas juga sangat penting di mana masyarakat mengharapkan layanan tersedia melalui berbagai saluran," ujar Asisten Deputi Standarisasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Indusif, Kementerian PANRB Taufiq Hidayanto Setiawan.

BPOM menyadari untuk membangun pengawasan obat dan makanan yang efektif maka koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak menjadi salah satu kunci yang perlu terus diupayakan. Dengan adanya Rakernas ini diharapkan dapat mengkonsolidasikan gerak bersama dalam perumusan kebijakan yang berkualitas. Tujuannya tentu untuk sebesar-besarnya kemaslahatan bersama yakni pertumbuhan dunia usaha obat dan makanan sekaligus benteng kesehatan masyarakat. ■



Jajaran Pimpinan UKP dan UIPT mengikuti Rakernas BPOM Tahun 2024, Semarang (27/03/2024)

01

Apakah kosmetik harus didaftarkan jika ingin diedarkan di Indonesia?



Tentu saja, setiap kosmetik hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar berupa nomor notifikasi.

Notifikasi dilakukan sebelum kosmetik beredar.

02

Apakah ada kosmetik yang tidak perlu didaftarkan terlebih dahulu?



Ada, yaitu kosmetik yang digunakan untuk penelitian dan sampel* untuk pameran dalam jumlah terbatas dan tidak diperjualbelikan.

*kosmetik tidak untuk diedarkan

03

Di mana mendaftarkan izin edar kosmetik?



Pendaftaran kosmetik dilakukan di BPOM, melalui aplikasi Notifkos pada website www.notifkos.pom.go.id

SERBA SERBI

Notifikasi KOSMETIK

04

Siapa saja yang dapat mendaftarkan kosmetik?



- Industri kosmetik yang berada di wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- Usaha perorangan/badan usaha di bidang kosmetik yang melakukan kontrak produksi dengan industri kosmetik yang berada di wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- Importir kosmetik yang bergerak di bidang kosmetik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Informasi lainnya dari A-Z tentang kosmetik, bisa kamu akses di sini, ya!





Oleh : Maulvi Muhammad Adib
Editor : Fathan Nur Hamidi

Jamin Keamanan Pangan di Hari yang Fitri

Jelang Idulfitri 2024, tampak orang berrompi biru dongker dan coklat muda mengelilingi rak produk makanan dan minuman di suatu swalayan. Mereka melihat produk makanan dan minuman, menulis dengan penanya di secarik kertas, dan dibawa ke tempat uji.



Petugas BPOM periksa pangan yang dijual di retail Jakarta. (20/3/2024).

Rompi orang-orang itu tertulis Food Inspector yang berasal dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pada Rabu itu 20/3/2024, mereka mengemban tugas untuk melakukan intensifikasi pengawasan pangan selama Ramadan dan jelang Idulfitri 2024 di salah satu swalayan di Jakarta Pusat.

Intensifikasi pengawasan pangan setiap tahun dilakukan dua kali oleh BPOM jelang hari besar keagamaan, yaitu Idulfitri dan Natal. Sebab jumlah transaksi keuangan pada dua hari tersebut mengalami peningkatan pesat dengan kehadiran tunjangan hari raya. Pada tahun ini, BPOM memulai intensifikasi pengawasan pada awal Maret 2024 dan berakhir pada minggu ketiga April 2024. Intensifikasi pengawasan ini merupakan agenda pengawasan khusus selain agenda pengawasan rutin yang terus berjalan.

Hasilnya, dari 3.649 sarana peredaran yang diperiksa, BPOM menemukan 996 sarana (27,3%) yang menjual produk tidak memenuhi ketentuan (TMK) berupa pangan tanpa izin edar (TIE), kedaluwarsa, dan rusak. Total temuan sebanyak 201.008 pieces pangan TMK dengan nilai ekonomi lebih dari 2,2 miliar rupiah.

Jika dibandingkan intensifikasi pengawasan pangan tahun lalu terjadi penurunan jumlah sarana yang diperiksa sebesar 11,73% yang sebelumnya 4.077 sarana. Jumlah sarana TMK juga mengalami penurunan sebesar 19,48% jika dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak sejumlah 1.190 sarana TMK.

Selain sarana peredaran di atas, intensifikasi pengawasan juga menyasar para penaja takjil. Takjil adalah makanan yang paling diburu masyarakat sebelum berbuka puasa. Hasil pengawasan takjil tahun 2024 menemukan 166 sampel (1,25%) produk pangan tidak memenuhi syarat (TMS) dari total 12.443 sampel.



Sejumlah pangan TMK hasil intensifikasi Pengawasan Pangan Selama Ramadan dan Idul Fitri, Jakarta (1/4/2024).

Turunnya temuan sarana TMK dan takjil TMS ini menunjukkan peningkatan *awareness* masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan bahan berbahaya pada produk pangan. Hal ini mengakibatkan *supply* produk pangan mengandung bahan berbahaya terus menurun.

E-commerce juga menjadi objek intensifikasi pengawasan melalui patroli siber. Hasilnya ditemukan 17.866 tautan pada *platform e-commerce* yang menjual produk pangan TIE dengan perkiraan nilai ekonomi mencapai 31,8 miliar rupiah.

Terhadap temuan tersebut, BPOM tidak tinggal diam. Pj. Kepala BPOM L. Rizka Andalusia menegaskan telah menindaklanjuti hasil pengawasan tersebut dengan melakukan langkah-langkah penanganan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Tindak lanjut ini termasuk melakukan pengamanan dan menginstruksikan retur/pengembalian produk kepada distributor produk TIE, serta pemusnahan produk. BPOM juga berkoordinasi dengan Asosiasi E-commerce Indonesia (jideA) untuk melakukan penurunan konten (*takedown*) terhadap *link* yang teridentifikasi menjual produk TIE.

"BPOM berkomitmen untuk mewujudkan pengawasan pangan yang berimbang. Hal ini dilakukan dengan mendukung pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberdayakan masyarakat untuk menjadi konsumen cerdas," tegasnya pada Sosialisasi Hasil Intensifikasi

Pengawasan Pangan Selama Ramadan dan Idulfitri, Senin (1/4/2024) di Kantor BPOM, Jakarta.

Respon Pelaku Usaha

Pengawasan peredaran produk yang dilakukan BPOM mendapat apresiasi dari salah satu pelaku usaha di Batam. Menurut Aryanto, Direktur Utama PT Srijaya Raya Perkasa yang berlokasi di Batam, dahulu kotanya sering menjadi tempat masuk produk ilegal dari negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. Dengan pengawasan BPOM, pengusaha dapat menjamin produk yang dijual berkualitas.

"Sangat rugi sekali ya kalau pengusaha tidak menjual produk yang

terdaftar, karena produk yang tidak terdaftar di BPOM itu pastinya tidak terjamin kualitasnya dan keselamatannya untuk konsumen," jelasnya.

Baginya sangat terbantu dengan kunjungan BPOM ke gudangnya pertiga bulan, perenam bulan untuk melakukan sidak dan pengecekan untuk menjamin masyarakat Batam mendapatkan produk yang berkualitas. "Kami sebagai pengusaha sangat terbantu sekali dengan pengawasan BPOM, karena produk yang saya jual ke konsumen, saya yakin sudah aman dikonsumsi oleh masyarakat Batam," terangnya.

Pengawasan BPOM juga mampu mengubah kebiasaan buruk pelaku usaha yang menggunakan bahan berbahaya. Salah satunya Oktavia, pedagang takjil mengungkapkan beberapa tahun lalu pernah ada pedagang yang menggunakan bahan berbahaya, seperti formalin dan boraks.

"Tapi, makin ke sini pihak BPOM sering berkunjung. Jadi, para pedagang sudah tidak menggunakan bahan berbahaya tersebut karena berbahaya bagi kesehatan," ujarnya.

Dia berharap BPOM sering berkunjung ke lokasi jualannya agar para pedagang mendapatkan ilmu dan wawasan. Selain itu dia juga berpesan kepada rekan-rekannya sesama pedagang. "Harapan saya semoga kita berjualan itu yang amanah, memakai bahan yang aman, agar wisata kuliner kita ramai," pesannya menutup wawancara dengan Tim MaPOM. ■



Pj. Kepala BPOM (tengah) bersama Pj. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Qlshan (kiri) dan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik (kanan) menunjukkan sejumlah temuan pangan TMK saat Sosialisasi Hasil Intensifikasi Pengawasan Pangan Selama Ramadan dan Idulfitri, Jakarta (1/4/2024).



Awas Obat Tetes Mata Herbal

Bisa Sebabkan Kebutaan

Oleh : Intan Julita, Lia Ardiana KN
Editor : Fathan Nur Hamidi

Mata merupakan organ vital bagi kehidupan manusia. Gangguan pada mata dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan kualitas hidup seseorang. Seseorang yang mengalami gangguan penglihatan memiliki keterbatasan dalam melihat objek dengan jelas. Kasus gangguan penglihatan sangat beragam, mulai dari masalah refraksi seperti rabun jauh atau dekat, hingga kondisi serius seperti katarak atau degenerasi makula.

Salah satu upaya untuk mencegah gangguan penglihatan, masyarakat masih memanfaatkan obat bahan alam sebagai upaya swamedikasi untuk tujuan memelihara kesehatan mata. Namun masyarakat masih perlu literasi informasi yang benar terkait penggunaan obat bahan alam. Sebagai alternatif pengobatan, penggunaan obat bahan alam harus tepat agar tidak terjadi penyalahgunaan yang menyebabkan resiko gangguan kesehatan lainnya.

Penyalahgunaan yang kerap nyata di media sosial yakni marak dijualnya obat tetes mata berbahan alam. Beberapa pengaduan terkait penggunaan obat tetes mata herbal masuk ke layanan pengaduan BPOM. Pembelian obat tetes mata

herbal biasanya dilakukan secara daring. Konsumen kemudian meletakkan ke mata. Setelah itu mata menjadi infeksi sehingga harus dilakukan pengangkatan bola mata.

Kasus ini tentu sangat merugikan konsumen dan berakibat fatal bagi masa depannya. Pasalnya sejatinya obat bahan alam dilarang diproduksi dan diedarkan dalam bentuk sediaan tetes mata. Hal ini sesuai dengan Peraturan BPOM No. 26 Tahun 2023 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Bahan Alam.

Obat tetes mata harus memenuhi sejumlah spesifikasi yang ketat. Obat tetes mata harus steril, bebas partikel asing, dan merupakan sediaan yang dibuat dan dikemas sedemikian

SYARAT UTAMA OBAT TETES MATA



STERIL

STERIL adalah bebas partikel asing dan kuman



ISOTONIS

ISOTONIS adalah mempunyai nilai tekanan osmosis yang sama cairan tubuh



ISOHIDRIS

ISOHIDRIS adalah mempunyai nilai pH yang sama dengan cairan fisiologis tubuh



rupa hingga sesuai digunakan pada mata. Pembuatan larutan obat mata membutuhkan perhatian khusus dalam hal toksisitas bahan obat, nilai isotonisitas, kebutuhan pengawet (dan jika perlu pemilihan pengawet) sterilisasi dan kemasan yang tepat.

Oleh karena itu, Obat tetes mata harus dibuat oleh industri yang telah menerapkan Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB), dalam hal ini adalah industri farmasi dan bukan industri atau usaha di bidang obat bahan alam. Dengan demikian, jelas dan

tegas tidak diperbolehkan obat tetes mata berbahan alam.

Obat Mata Bahan Alam

Terdapat obat bahan alam yang ditujukan untuk membantu memelihara kesehatan mata. Beberapa herbal yang mempunyai empiris untuk pengobatan gangguan mata antara lain wortel (*Daucus carota*), buah bilberry (*Vaccinium myrtillus*), tomat (*Solanum lycopersum*). Klaim yang disetujui hanya sebatas 'Membantu memelihara kesehatan mata'.

Obat bahan alam yang telah diberikan izin edar BPOM terbatas pada sediaan oral yang diminum seperti serbuk, kapsul, tablet, dan cairan obat dalam. Tidak ada sediaan yang terdaftar di BPOM yang digunakan dengan cara diteteskani pada organ mata. Sehingga obat bahan alam yang beredar dan digunakan dengan cara diteteskani ke mata merupakan produk ilegal atau tanpa izin edar yang tidak terjamin keamanan, khasiat, dan mutu produk. ■



OBAT TETES MATA HERBAL

Obat tetes mata herbal BERBAHAYA
Tidak Steril
Tidak Isotonis
Tidak Isohidris



Obat Bahan Alam tidak
diizinkan dalam bentuk
sediaan tetes mata



Penggunaan Obat Bahan Alam yang ditujukan untuk membantu kesehatan mata adalah dilarutkan dalam air untuk diminum (tidak untuk diteteskani ke mata)





Oleh : Devi Oktaviani
Editor : Fathan Nur Hamidi

Pesona Alami Puteri Indonesia Kenalkan Kosmetik Aman Pada Generasi Muda



Finalis Puteri Indonesia 2024 mengikuti Pembekalan BPOM.

Puteri Indonesia menjadi simbol kecantikan, keanggunan, dan kepintaran bagi generasi muda. Di balik pesona alaminya, Puteri Indonesia juga mengemban peran penting sebagai Duta Kosmetik Aman dari BPOM untuk menyebarkan kesadaran tentang pentingnya memilih kosmetik yang aman dan bertanggung jawab. Puteri Indonesia sebagai ikon kecantikan nasional dapat memanfaatkan pengaruhnya untuk mengedukasi insan muda tentang pentingnya produk kosmetik yang aman, sehat, dan sesuai dengan kebutuhannya.

Beauty, Brain, dan Behaviour atau 3B merupakan salah satu nilai yang harus ada dalam seorang Puteri Indonesia. Slogan tersebut menyuarakan kekuatan perempuan yang memiliki kecantikan dari dalam dan didukung oleh kecerdasan serta tingkah laku yang baik. Sebagai *influencer* kecantikan, Puteri Indonesia tak segan menggunakan value 3B tersebut untuk mengedukasi generasi muda agar bangga terhadap kecantikan yang beragam di tiap individu.

Salah satunya Farhana Nariawari yang merupakan Puteri Indonesia Tahun 2023, ia menceritakan kebanggaannya memiliki warna kulit sawo matang yang merupakan warna khas Indonesia. "Aku sebagai Puteri Indonesia selalu bangga dengan warna kulitku, warna kulit asli Indonesia," ujarnya dengan percaya diri dalam Podcast KataBPOM: Kosmetik Aman Jadi Pilihan, 21 Maret 2024.

Namun di sisi lain, Farhana juga menghadapi banyak komentar negatif tentang warna kulitnya, yang dianggap tidak



Pt. Kepala BPOM L Rizka Andalusia memberikan pembekalan kepada 42 Finalis Puteri Indonesia 2024 tentang peran Puteri Indonesia sebagai influencer obat dan makanan yang aman, Jakarta, (27/2/2024).

sesuai dengan standar kecantikan yang ada. Pada akhirnya, ia memilih untuk menentang pandangan sempit ini dengan menginspirasi banyak orang untuk bangga dengan identitas dan warna kulit mereka sendiri.

"It's not about being white, tapi kita dengan kecantikan asli Indonesia pun bisa cantik tentunya dengan kosmetik aman," ungkap perempuan berdarah Sunda ini.

Tidak hanya Farhana, Puteri Indonesia lainnya juga menyoroti pentingnya memilih kosmetik yang aman, terutama bagi generasi muda yang sering kali tergoda oleh promo dan tren tanpa memperhatikan kualitas dan keamanan produk yang mereka gunakan. Upaya ini dapat diwujudkan dengan mengedukasi anak muda agar lebih berhati-hati dan memahami kebutuhan kulit mereka, serta menggunakan kosmetik yang telah teruji secara dermatologis dan memiliki izin dari BPOM.

Peran BPOM Mengawal Puteri Indonesia

Terhitung sudah 6 tahun (2019-2024), BPOM dan Yayasan Puteri Indonesia (YPI) bersinergi memperkuat peran Puteri Indonesia di masyarakat. Kerja sama ini ditandai dengan Penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) tentang Peningkatan Peran Puteri Indonesia di Bidang Keamanan Serta Mutu Obat dan Makanan pada November 2019. Kegiatan ini didahului oleh pembekalan tentang Kosmetik Aman pada Maret 2019.

Pasca penandatanganan MoU, BPOM memulai langkah konkret melalui pelatihan Puteri Indonesia sebagai Duta Kosmetik Aman pada 2019 serta melantik 7 finalis Puteri Indonesia sebagai Duta Kosmetik Aman. BPOM terus melakukan pembekalan di tahun berikutnya yaitu pembekalan pada 39 Finalis Puteri Indonesia tahun 2020, pembekalan 45 finalis Puteri Indonesia tahun 2022, dan pembekalan 45 finalis Puteri Indonesia tahun 2023.

Pt. Kepala BPOM, L Rizka Andalusia menyambut baik pembekalan informasi obat dan makanan kepada 42 finalis Puteri Indonesia 2024. Ia menekankan pentingnya peran pengawasan obat dan makanan, termasuk kosmetik, yang tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja melalui BPOM. Keterlibatan sektor swasta dan masyarakat sangat krusial dalam upaya ini.

BPOM mengapresiasi semua elemen yang terlibat dalam pemilihan Puteri Indonesia termasuk keterlibatan finalis Puteri Indonesia dalam pengawasan obat dan makanan. "Saya sangat mengapresiasi upaya mereka dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cara mengenali obat, makanan, dan kosmetik yang aman," ujar Pt. Kepala BPOM dengan penuh semangat.

Sementara itu, Ketua Panitia Pemilihan Puteri Indonesia, Kusuma Ida Anjani menyampaikan bahwa pada 2024 terdapat 42 finalis yang dinilai berdasarkan tiga pilar utama: kecantikan (*beauty*), kecerdasan (*brain*), dan perilaku (*behavior*). Mereka adalah putri-putri terbaik dari masing-masing daerah.

Finalis Puteri Indonesia hadir di sini dengan membawa berbagai misi. Misi untuk perubahan, perbaikan, perkembangan, dan keberlanjutan yang mendasar di berbagai bidang. Banyak dari mereka memiliki latar belakang medis, kedokteran, dan bahkan ada yang sudah memulai bisnis klinik kecantikan. "Pemaparan dari BPOM tentang pentingnya kosmetik dan obat yang aman akan sangat bermanfaat bagi mereka," jelasnya.

Misi perubahan yang dijalankan bersama antara BPOM dan Puteri Indonesia ini diharapkan dapat memberikan pengaruh positif kepada kaum muda untuk memilih obat dan makanan, termasuk kosmetik yang aman. Semoga banyak anak muda yang terinspirasi untuk menjaga kecantikan alami mereka dengan produk yang aman dan berkualitas. ■



Puteri Indonesia 2023 Farhana Nariyari bersama Direktur Pengawasan Kosmetik Irwan dalam Podcast KataBPOM Episode 4: Kosmetik Aman Jadi Pilihan, Jakarta (21/4/2024).



Ditulis : Desti Rachmadyah NS
Editor : Fathian Nur Hamidi

Suplemen Kesehatan: Jalan Pintas untuk Tumbuh Kembang Anak?



Kurus, stunting, dan lambat berpikir. Tiga kata yang menakutkan bagi orang tua dengan anak di masa tumbuh kembang. Ketakutan yang membuat orang tua rela melakukan apapun untuk memastikan anaknya tumbuh dan berkembang dengan baik, termasuk dengan memberikan suplemen sebagai stimulasi pertumbuhan. Namun, perlukah suplemen kesehatan diberikan untuk membantu tumbuh kembang anak?

Keterlambatan tumbuh kembang anak masih menjadi masalah serius di negara maju maupun berkembang, termasuk di Indonesia. Profil Kesehatan Indonesia pada tahun 2016 menunjukkan bahwa sekitar 66.4% anak usia di bawah 5 tahun mengalami gangguan tumbuh kembang. Hal ini menjadi perhatian pemerintah karena pertumbuhan dan perkembangan anak akan memengaruhi kualitas hidup generasi masa depan.

Kekhawatiran akan hal ini memacu

orang untuk bertindak lebih jauh dengan memberikan suplemen kesehatan untuk meningkatkan tumbuh kembang anak. Tidak sedikit orang tua yang tergiur oleh iklan-iklan yang menawarkan suplemen anak dengan klaim sebagai pengganti buah dan sayur, meningkatkan daya tahan dan sistem kekebalan tubuh, menambah nafsu makan, dan memberi nutrisi jaringan otak. Kenyataannya, tidak sedikit suplemen anak yang memiliki klaim berlebihan dan menyesatkan. Hasil pengawasan BPOM, iklan untuk

suplemen Kesehatan dengan kategori klaim "multivitamin" dan "penambah nafsu makan" yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) cenderung meningkat sekitar 13% pada 2022 dan 16% pada 2023.

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik (Deputi 2), Mohammad Kashuri, mengungkapkan, "Gizi yang berkualitas adalah penentu keberlangsungan hidup, kesehatan, dan pertumbuhan anak. Kekurangan gizi dapat menyebabkan *stunting*, berat



BPPM bersama para ahli dan public figure bahas suplemen kesehatan pada tumbuh kembang anak, Jakarta (23/2/2024).

badan rendah, dan anak sangat kurus (*wasting*). Orang tua memiliki peran untuk tumbuh kembang anak, oleh karena itu orang tua harus memiliki pengetahuan yang baik tentang pemenuhan gizi, termasuk dalam memberikan suplemen kesehatan pada anak.”

Jalan Pintas Suplemen Kesehatan

Dilansir dari Kementerian Kesehatan, kebutuhan-kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang yang optimal meliputi Asuh (kebutuhan fisik-biologis), Asih (kebutuhan kasih sayang dan emosi), dan Asah (kebutuhan stimulasi yang tepat sesuai usianya). Asupan gizi yang baik akan mendukung tumbuh kembang yang baik. Sebaliknya jika asupan gizinya tidak memadai, perlu diwaspadai adanya keterlambatan atau gangguan tumbuh kembang. Beberapa kasus yang sering terjadi akibat kurangnya asupan gizi antara lain *stunting*, berat badan rendah, dan anak sangat kurus (*wasting*).

Tidak sedikit orang tua beranggapan bahwa suplemen kesehatan adalah jalan pintas untuk mendukung tumbuh

kembang. Jika anak susah makan, jika anak tumbuh kembangnya menurun, semua aman selama anak mengonsumsi suplemen. Padahal, jika kondisi anak baik dan tumbuh kembangnya berlangsung normal sesuai usianya, pemberian suplemen kesehatan tambahan secara tidak tepat justru bisa mengganggu kesehatan anak.

“Suplemen kesehatan hanya diperlukan pada kondisi tertentu, misalnya jika kondisi anak *picky eater*, *small eater* (makan dengan porsi sedikit), hanya makan kurang dari 20 jenis makanan, atau pada anak dengan kondisi medis seperti alergi makanan, menderita penyakit kronis, atau diharuskan diet terbatas. Anak dengan tumbuh kembang yang baik tidak memerlukan suplemen kesehatan,” jelas Ariani. Ariani juga menekankan bahwa tidak baik untuk terus-menerus memberikan suplemen kesehatan pada anak karena anak bisa mengalami overdosis vitamin.

Pemberian suplemen kesehatan tambahan secara tidak tepat justru bisa mengganggu kesehatan anak. Sebagai

contoh, suplemen vitamin berbentuk permen kenyal (*gummy*) disukai anak-anak karena manis dan memiliki bentuk juga warna yang menggemaskan. Namun permen kenyal cenderung mengandung gula yang tinggi, yang bisa meningkatkan risiko obesitas dan kerusakan gigi. Penting bagi orang tua untuk membatasi anak-anak agar tidak mengonsumsi suplemen berlebihan.

Tentunya, sebelum memberikan suplemen anak, orang tua perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama tentu saja orang tua perlu berkonsultasi dahulu kepada dokter, apakah anak bertumbuh kembang baik atau perlu dibantu dengan suplemen. Jangan lupa untuk mengonsultasikan dosis yang tepat agar sesuai dengan kebutuhan si kecil. Orang tua juga perlu hati-hati dalam memilih suplemen kesehatan. Jangan mudah tergiur dengan iklan yang menjanjikan kaim yang berlebihan atau bombastis. Pastikan produk suplemen kesehatan yang diterima dalam kondisi baik dengan melakukan Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa). ■



Memahami Tes Narkoba: Jangan Khawatir Jika Hasilnya Positif!

Oleh : Fauziah Ridho
Editor : Fathah Nur Hamidi

Masih ingat jagat media sosial digemparkan dengan postingan salah satu komika Indonesia yang menyebutkan bahwa istrinya positif narkoba usai mengonsumsi obat flu. Sontak postingan tersebut membuat publik bertanya-tanya, kok bisa?



Proses skrining narkoba (*drug abuse screening test*) adalah pemeriksaan secara kualitatif terhadap kandungan narkoba atau metabolitnya di dalam tubuh. Narkoba mencakup zat-zat seperti narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan ketergantungan fisik dan psikologis serta berdampak negatif pada kesehatan.

Tes ini dimulai dengan pengumpulan spesimen urine, darah, rambut, saliva, keringat, dan kuku. Masing-masing spesimen memberikan tingkat spesifisitas, sensitivitas, dan akurasi yang berbeda-beda. Urine merupakan spesimen yang

paling sering digunakan karena mudah untuk diambil.

Secara umum, terdapat 2 metode pemeriksaan narkoba yakni *immunoassay* dan kromatografi gas – spektrometri massa (KG-MS). Metode pengujian *immunoassay* menggunakan antibodi untuk mendeteksi keberadaan obat atau metabolit tertentu. Metode ini umum digunakan pada skrining narkoba karena memiliki keuntungan dapat mencakup skrining skala besar melalui otomatisasi dan deteksi cepat. Namun, metode ini memiliki kekurangan. Hasilnya bisa saja positif palsu karena metode ini dapat mendeteksi obat pada

kelas yang sama sehingga diperlukan tes kedua untuk konfirmasi.

Hasil *immunoassay* dianggap dugaan sampai dikonfirmasi melalui uji laboratorium (misalnya kromatografi gas – spektrometri massa (KG-MS) atau kromatografi cair kinerja tinggi (KOKT)). KG-MS merupakan metode yang mampu mendeteksi sejumlah kecil zat dan mengonfirmasi keberadaan obat tertentu secara akurat, sensitif, dan andal. Namun tes ini butuh waktu yang lama, personel dengan keahlian khusus, dan biaya yang mahal. Oleh karena itu, KG-MS biasanya dilakukan sebagai uji konfirmasi apabila pada pengujian

Daftar Obat yang Berpotensi Timbulkan Hasil Positif Palsu

No.	Zat yang diuji menggunakan immunoassay	Zat yang berpotensi menyebabkan hasil positif palsu (berdasarkan obat yang terdaftar di Indonesia)
1.	Alkohol	Alkohol rantai pendek (misalnya: isopropil alkohol)
2.	Amfetamin	klorpromazin, efedrin, isoksuprin, methylenedioxymethylamphetamine (MDMA), metamfetamin, l-metamfetamin (Vick's Inhaler), obat attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) seperti metilfenidat, fenilpropionolamin, prometazin, pseudoefedrin, ranitidin
3.	Benzodiazepin	Obat golongan inhibitor reuptake serotonin selektif seperti sertraline
4.	Cannabinoid/ Ganja	efavirenz, obat golongan nonsteroid anti-inflamatory drug (NSAID), obat golongan proton pump inhibitors (PPI)
5.	Kokain	Teh daun koka, anastesi topikal yang mengandung kokain
6.	Opioid, opiat, dan heroin	dekstrometorfan, diphenhydramine ¹⁾ , heroin opiat (kodein, hidromorfon, hidroksidon, morfin), biji opium, kina, kulinolon, nfampin, verapamil dan metabolitnya ²⁾
7.	Fensiklidin	dekstrometorfan, diphenhydramine, doxylamine, ibuprofen, ketamine, tramadol, venlafaxine
8.	Antidepresan trisiklik	karbamazepin ³⁾ , siproheptadin ³⁾ , difenhidramin ³⁾ , hidroksizin ³⁾ , quetiapin

Keterangan:

¹⁾ Diphenhydramine dan verapamil (termasuk metabolitnya) telah terbukti memberikan hasil positif hanya pada tes metadon;

²⁾ Laporan hasil positif palsu hanya terjadi pada spesimen darah (serum);

Disclaimer: Informasi pada tabel tidak mencakup semua zat/senyawa yang dapat menyebabkan hasil positif palsu.

Immunoassay diperoleh hasil positif.

Skrining narkoba menggunakan metode immunoassay akan menunjukkan hasil positif apabila antibodi terikat dengan obat atau salah satu turunan kimianya. Namun antibodi juga dapat mengikat zat lain yang bentuknya serupa dengan yang seharusnya dideteksi. Misalnya seseorang sedang mengonsumsi obat resep yang bentuk molekulnya mirip dengan narkoba. Misalnya seseorang sedang mengonsumsi obat yang bentuk molekulnya mirip dengan narkoba, maka antibodi akan

mengenali molekul tersebut sebagai narkoba, sehingga menunjukkan hasil positif.

Informasikan Tenaga Medis

Jika #SahabatBPOM merasa mendapat hasil positif palsu, segera informasikan kepada tenaga kesehatan terkait, obat yang sedang dikonsumsi. Apabila diyakini hasil tes narkoba positif palsu karena penggunaan obat lain selain narkoba, maka dapat diusulkan untuk dilakukan uji konfirmasi.

Selain itu, sebagai bentuk antisipasi hasil pemeriksaan positif palsu, kalian

dapat menuliskan semua obat yang dikonsumsi selama seminggu terakhir. Sebelum pemeriksaan berlangsung, informasikan semua obat yang dikonsumsi, baik obat dari resep dokter maupun obat yang dibeli sendiri di apotek.

Jadi, #SahabatBPOM tidak perlu khawatir apabila tes skrining narkoba menunjukkan hasil yang positif. Apalagi Sahabat BPOM tidak pernah mengonsumsi narkoba ya. Buat generasi muda Indonesia, mari bersama tolak penyalahgunaan narkoba untuk wujudkan Indonesia Emas 2045. ■

Yuk....! Tolak Penyalahgunaan Narkoba Untuk Generasi Cerdas & Produktif Menuju Indonesia Emas 2045

dengan melakukan hal-hal ini:

- 1 Menambah keimanan kepada Tuhan
- 2 Menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga
- 3 Menghindari pergaulan bebas
- 4 Melakukan kegiatan positif
- 5 Mengembangkan pendidikan anti narkoba
- 6 Meningkatkan kampanye pencegahan penyalahgunaan narkoba
- 7 Melakukan deteksi dini penyalahgunaan narkoba dan pelaporan kasus





Oleh : Eko Handoyo
Editor : Gita Indah N.S

Angkat Jamu Indonesia ke Pasar Dunia melalui NUANSA



Di balik popularitas jamu sebagai warisan budaya nusantara yang telah lama dipercaya oleh masyarakat Indonesia, terdapat potensi besar yang masih menunggu untuk dikembangkan sepenuhnya. Menyadari tantangan ini, BPOM meluncurkan inovasi NUANSA (Naik Kelas Usaha Mikro Kecil Obat Bahan Alam Indonesia) dengan visi penuh harapan yaitu membawa jamu dan produk obat bahan alam (OBA) lainnya dari skala mikro dan kecil ke panggung internasional.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, OBA adalah bahan atau produk yang berasal dari sumber daya alam seperti tumbuhan, hewan, dan mineral, yang telah terbukti berkhasiat secara empiris atau ilmiah. Jamu, sebagai salah satu bentuk OBA, bukan hanya sekadar ramuan tradisional, tetapi juga bagian dari kearifan lokal yang diakui oleh pemerintah Indonesia melalui berbagai regulasi. Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu, pemerintah menegaskan

komitmennya untuk mengangkat posisi jamu di pasar lokal maupun global.

Namun, tantangan besar muncul dalam upaya memenuhi standar yang telah ditetapkan untuk mendapatkan izin edar BPOM. Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2023 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Bahan Alam mengatur dengan tegas kriteria dan tata laksana registrasi OBA, termasuk jamu, obat herbal teratandar, dan fitofarmaka. Bayangkan seorang pengusaha kecil di sebuah daerah terpencil di Indonesia, dengan tangan terampil meracik jamu dari bahan-bahan alami yang telah diwariskan turun-temurun. Ia ingin membawa

produknya ke pasar yang lebih luas, tetapi dihadapkan pada tantangan besar. Bagaimana memastikan produknya memenuhi standar yang telah ditetapkan sehingga bisa bersaing di pasar nasional, bahkan internasional?

Di sinilah program NUANSA hadir sebagai solusi. Program yang diluncurkan saat pelaksanaan Forum Koordinasi Teknis Nasional BPOM 2024 pada Maret 2024 lalu, dirancang untuk membantu pelaku usaha OBA, khususnya usaha mikro obat tradisional (UMOT) dan usaha kecil obat tradisional (UKOT), agar mampu meningkatkan daya saing produk mereka. Caranya?

Dengan menerapkan standar cara pembuatan obat tradisional yang baik (OPOTB) secara menyeluruh (*full aspect*).

Transformasi yang Diperlukan

Program NUANSA tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk obat bahan alam, tetapi juga mendukung daya saing UMKM di sektor ini. Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan, setiap pelaku usaha harus memproduksi produk yang memenuhi kriteria keamanan, khasiat, dan mutu yang semuanya akan tercapai dengan menerapkan OPOTB. Namun, memahami bahwa tidak semua pelaku usaha mikro dan kecil bisa langsung menerapkan 12 aspek OPOTB sekaligus, BPOM memberikan solusi yang lebih fleksibel yaitu Sertifikasi OPOTB Bertahap.

OPOTB Bertahap memungkinkan pelaku usaha untuk menerapkan standar ini secara bertahap yaitu dalam 3 tahap. Masing-masing sertifikatnya berlaku selama 3 tahun. Sertifikat ini bahkan dapat diperpanjang hingga 2 kali untuk usaha yang memproduksi kapsul dan cairan obat dalam, dan 3 kali untuk produk lainnya. Ini artinya, pelaku usaha diberi waktu hingga 27 tahun untuk sepenuhnya memenuhi standar OPOTB jika mereka memproduksi kapsul dan cairan obat dalam, serta hingga 36 tahun untuk produk lainnya.

Program ini memberikan harapan

dan kesempatan bagi para pelaku usaha mikro dan kecil untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas, sambil tetap mematuhi standar keamanan dan mutu yang ditetapkan. Tahapan OPOTB ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari sanitasi, dokumentasi, manajemen mutu, produksi, hingga penyimpanan dan pengiriman. Namun, seiring berjalannya waktu, relaksasi melalui OPOTB Bertahap telah menempatkan banyak UMKM dalam "zona nyaman". Akibatnya banyak dari mereka tetap berada pada level yang sama dan tidak bergerak ke tahap berikutnya.

Mengatasi Tantangan dan Membangun Potensi

Sebagai respon terhadap situasi ini, NUANSA hadir dengan tujuan mendorong percepatan penerapan OPOTB secara menyeluruh (*full aspect*) oleh UMKM. Langkah awal yang dilakukan adalah pemetaan (*mapping*) oleh Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan BPOM selama periode 2021-2023. Proses ini melibatkan survei dan analisis mendalam di berbagai wilayah di Indonesia untuk mendapatkan data akurat mengenai kemampuan UMKM dalam menerapkan OPOTB.

Hasilnya, sejumlah 748 sarana produksi diidentifikasi sebagai target utama dalam program percepatan ini. BPOM, melalui unit teknis dan unit pelaksana teknis di seluruh Indonesia,

akan memberikan pendampingan intensif kepada UMKM yang telah menunjukkan kinerja baik dan sangat baik dalam menerapkan OPOTB Bertahap. Dengan pendampingan ini, diharapkan UMKM tersebut dapat terus meningkatkan kualitasnya, hingga akhirnya memenuhi standar OPOTB secara menyeluruh (*full aspect*).

Menuju Pasar Global

Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025--2045, industri farmasi yang berbasis sumber daya alam diakui sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional. Dengan visi menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045, program NUANSA diharapkan dapat berkontribusi signifikan dalam memperkuat sektor farmasi dan kesehatan, terutama dalam pengembangan produk-produk jamu dan OBA lainnya yang memiliki potensi besar di pasar global.

Dengan modernisasi industri melalui integrasi rantai pasok dan nilai dari hulu ke hilir, serta dukungan inovasi dan sumber daya manusia yang berkualitas, NUANSA tidak hanya meningkatkan kualitas dan daya saing produk, tetapi juga memberikan harapan besar agar jamu Indonesia dikenal di seluruh dunia. Ini adalah langkah nyata menuju Indonesia Emas 2045, di mana produk-produk lokal dapat bersaing di panggung global dengan standar keamanan dan mutu yang tinggi. ■

Hasil *self-assessment mapping* kemampuan UMKM dalam menerapkan CPOTB





23 Tahun

Peran Penting Tim Komite Nasional (Komnas) Penilai Obat

Dalam Pengawasan *Pre-Market*
Produk Obat di Indonesia

Oleh : Mayerni Mutiara Situmorang
Editor : Hendriq Fauzan Kustanto

Dalam menjalankan mandatnya, BPOM berkomitmen memastikan obat yang beredar aman dan bermutu. Salah satu strateginya melalui evaluasi praedar (*pre-market*), yang mencakup penilaian keamanan, khasiat, dan mutu obat. Pengawasan *pre-market* menjadi garda terdepan dalam mencegah produk obat yang tidak memenuhi standar. Dalam hal ini BPOM bekerja sama dengan Komnas Penilai Obat yang juga memegang peran vital. Bersama Komnas Penilai Obat, BPOM memastikan setiap obat yang disetujui, aman dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pentingnya Pengawasan *Pre-Market* Produk Obat

BPOM memainkan peran penting dalam pengawasan obat di Indonesia mulai dari *pre-market* hingga *post-market*. Pengawasan *pre-market* dilakukan untuk memastikan bahwa obat-obatan yang beredar di pasar menjadi aman dan efektif ketika digunakan oleh masyarakat. Pengawasan ini tidak hanya mencegah risiko kesehatan tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap produk farmasi. Direktorat Registrasi Obat BPOM bertanggung jawab untuk mengawal proses pengawasan *pre-market* dan memastikan setiap obat yang diajukan memperoleh izin edar, melalui pemenuhan standar yang ketat.

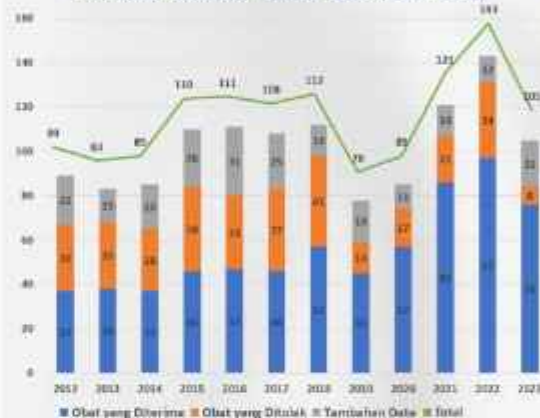
Evaluator melakukan penilaian berdasarkan data nonklinik dan klinik. Evaluator tersebut terdiri dari tim evaluator internal BPOM dan evaluator di berbagai sentra evaluasi. Data pendukung dievaluasi secara menyeluruh lalu dibahas dalam Rapat Pleno Komite Nasional (Komnas) Penilai Obat. Komnas Penilai Obat, yang terdiri dari Tim Inti Komnas dan Tim Ahli Klinis kemudian memberikan rekomendasi berdasarkan kajian manfaat risiko yang objektif dan bebas bias. Rekomendasi dapat berupa penerimaan, penolakan, atau permintaan tambahan data. Pendekatan yang ketat dan terstruktur ini memastikan bahwa pengawasan *pre-market* di Indonesia sejalan dengan praktik terbaik di negara-negara maju. Semata-mata untuk melindungi masyarakat dari risiko kesehatan dan menjamin manfaat nyata dari obat yang beredar.



KOLABORASI HINGGA
PELOSOK NEGERI
UNTUK MELINDUNGI
MASYARAKAT

KALEIDOSKOP KOMNAS PENILAI OBAT

PERFORMA KOMNAS PENILAI OBAT (2012-2023)



1979

- Pembentukan Panitia Penilai Obat (PPOJ)
- Senter penilaian obat hanya dari UI



2016-

- Persetujuan
- Persetujuan
- Persetujuan
- Persetujuan



ERA
PANDEMI
COVID-19

2020 - 2023

- Persetujuan Rabiwax-S, vaksin Rabies untuk mengatasi Kejadian Luar Biasa di Bali
- Rapat KOMNAS menjadi daring/online

1999

- PPOJ menjadi Komite Nasional Penilai Obat Jadi (Komnas POJ)
- Senter penilaian obat menjadi UI, UGM, dan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (Ditjen POM)
- Pembahasan Pleno Komnas Penilai Obat
- Pelatihan evaluasi bersama UGM
- Informasi teknis lebih lengkap

1992

- Senter penilaian obat bertambah menjadi UI dan UGM
- Informasi teknis sederhana
- Evaluasi dan rekomendasi ditingkat senter

2001



Ditjen POM menjadi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

2002-2005

- Persetujuan Buprenorphine untuk terapi substitusi ketergantungan opioid
- Persetujuan Osetamivir untuk mendukung penanggulangan Wabah Flu Burung
- Penerbitan Pedoman Penilaian pertama untuk Antihipertensi, Antibakteri dan Uji Bioekivalensi



2007

- Persetujuan Vaksin HPV pertama di Indonesia, evaluasi paralel dengan negara referensi lain

DIREKTORAT REGISTRASI OBAT



- Senter Penilaian Obat menjadi 5: 2 senter UGM, UI, ITB, BPOM

2019

Persetujuan Obat Hepatitis C golongan baru *direct-acting antivirals* (DAAs)
Persetujuan vaksin dengue pertama di dunia, evaluasi paralel dengan negara lain, belum terdaftar di negara asal
Persetujuan Pifenedone dan Nintedanib, obat untuk fibrosis paru yang merupakan *new disease*

2011-2015

- Persetujuan Vaksin meningitis pertama yang mendapatkan sertifikat halal MUI
- Persetujuan vaksin pentavalent untuk program imunisasi dasar anak
- Penerbitan Pedoman Biosimilar



2024

Obat yang mendapatkan EUA:

- Chloroquine Phosphate
- Hydroxychloroquine Sulfate
- Favipiravir
- Remdesivir
- Molnupiravir
- Regdanvimab
- Nirmatrelvir/ Ritonavir

Vaksin yang mendapatkan EUA:

- 5 Vaksin inactivated
- 6 Vaksin adenovirus
- 3 Vaksin mRNA
- 4 Vaksin protein sub-unit

PASCA PANDEMI COVID-19

2023

- KOMNAS menyetujui 2 obat dan 4 vaksin yang telah mendapatkan EUA untuk menjadi NIE
- Nirmatrelvir/ Ritonavir
 - Molnupiravir
 - 2 Vaksin inactivated
 - 2 Vaksin adenovirus

Komitmen mendukung BPOM mencapai WHO-Listed Authority (WLA)



Pencanangan Komitmen Dukungan Komnas Penilai Obat untuk BPOM menuju WLA, Bali (22/4/2024)

23 Tahun Perjalanan Komnas Penilai Obat

Sejarah penilaian khasiat dan keamanan obat di Indonesia dimulai sejak 1979, ketika BPOM secara struktural masih menjadi bagian dari Kementerian Kesehatan. Untuk memperkuat pengawasan obat, pada 2001 dibentuklah Komnas Penilai Obat. Sejak 2007, 6 sentra penilaian obat didirikan di berbagai institusi, yaitu Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), BPOM, dan 2 sentra di Universitas Gajah Mada (UGM). Tim inti Komnas Penilai Obat dipilih berdasarkan kompetensi dan independensi, serta terdiri dari ahli di berbagai bidang seperti farmakologi, epidemiologi, dan vaksinologi. Setiap anggota tim wajib menandatangani deklarasi *no conflict of interest* dan perjanjian kerahasiaan untuk menjaga integritas dan kredibilitas proses evaluasi.

Sejak pembentukannya, Komnas Penilai Obat telah melalui berbagai fase pengembangan dan peningkatan peran. Pada periode 1990-2010, Komnas menjadi tonggak penting dalam evaluasi obat di Indonesia. Selanjutnya,

pada periode 2011-2015, Komnas mengoptimalkan perannya sesuai dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan masyarakat. Pada periode 2016-2020, Komnas semakin menguatkan posisinya sebagai komite penilai yang independen dan kompeten.

Pandemi COVID-19 menjadi momen krusial di mana produktivitas tim ini meningkat secara tajam. Dengan adopsi rapat daring, fleksibilitas menjadi semakin meningkat sehingga dapat mendukung percepatan akses obat dan vaksin yang vital. Hingga kini, sebanyak 17 obat dan 14 vaksin telah mendapatkan *emergency use authorization*, serta sejumlah 4 obat dan 4 vaksin telah mendapatkan nomor izin edar untuk obat COVID-19. Kontribusi signifikan Komnas Penilai Obat dalam memastikan keamanan, khasiat, dan mutu obat di Indonesia juga semakin memperkuat peran BPOM sebagai otoritas regulatori yang diakui baik di dalam negeri maupun secara global.

Menuju WHO Listed Authority (WLA)

Kolaborasi antara BPOM dan Komnas Penilai Obat merupakan langkah strategis

untuk mencapai status WLA. WLA adalah skema baru yang akan menggantikan *stringent regulatory authority*, di mana negara yang masuk dalam daftar WLA akan menjadi referensi global dalam hal *output* regulasi, praktik, dan keputusan.

Saat ini, BPOM masuk dalam daftar *transitional WLA* dan berkesempatan untuk mengajukan penilaian menjadi WLA. Dalam upaya mencapai WLA ini, BPOM mengajukan penilaian kepada WHO terkait dengan produk vaksin. Sebelumnya pada penilaian WHO tahun 2018 menunjukkan bahwa BPOM berhasil mencapai *Maturity Level 3* untuk produk vaksin, yang kemudian dipertahankan hingga *follow-up visit* tahun 2022.

Komnas Penilai Obat memainkan peran kunci dalam proses registrasi obat di mana evaluasi yang dilakukan sangat penting untuk mendukung BPOM mencapai status WLA. Melalui implementasi *good review practices* dan evaluasi menyeluruh terhadap keamanan, khasiat, dan mutu obat sebelum izin edar, Komnas Penilai Obat memastikan bahwa proses registrasi berjalan sesuai standar internasional. Kolaborasi ini diharapkan mendukung pencapaian status WLA.

Tantangan dan Solusi dalam Pengawasan Obat

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran serta farmasi, pengawasan obat di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya memastikan efektivitas pengawasan dalam menghadapi pesatnya inovasi dalam industri farmasi. Untuk mengatasi hal ini, peningkatan efektivitas dan kinerja Komnas Penilai Obat menjadi penting. Hal tersebut dapat diatasi melalui regenerasi dan penguatan keanggotaan Komnas Penilai Obat.

Proses regenerasi melibatkan penajakan calon anggota dari berbagai institusi pendidikan di Indonesia dengan mempertimbangkan independensi, kualifikasi, dan keahlian. Dengan regenerasi ini diharapkan mengukuhkan posisi BPOM sebagai badan regulatori yang diakui secara global, sehingga dapat terus memberikan keputusan berkualitas. BPOM dan Komnas Penilai Obat secara berkesinambungan terus bersinergi memastikan keamanan, khasiat, dan mutu obat yang beredar di Indonesia. ■

Tanya & Jawab Seputar Kosmetik



1 Emang iya *skincare* itu bukan kosmetik?

Salah, *skincare* termasuk kosmetik. Kosmetik dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu kosmetik perawatan dan dekoratif.

2 Kosmetik bisa mengobati penyakit, ya?

Tidak bisa, kosmetik berfungsi hanya untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

3 Apakah injeksi vitamin C termasuk kosmetik?

Bukan, kosmetik hanya digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut. Injeksi vitamin C itu termasuk obat.

4 Emang boleh kosmetik menggunakan klaim dapat mengobati peradangan jerawat?

Tidak boleh, klaim kosmetik harus memenuhi unsur objektivitas, kebenaran, serta tidak menyesatkan. Klaim mengobati termasuk tidak boleh, karena menyesatkan. Kosmetik tidak digunakan untuk mengobati.

Informasi kosmetik yang aman, bukan kata orang, pastikan

kata BPOM



Oleh : Pesta Sibarani
Editor : Hendriq Fauzan K

BPOM Bangun Kerja Sama Internasional melalui Produksi ASEAN Reference Substances

"Saat ini negara-negara di kawasan ASEAN termasuk Indonesia masih menghadapi tantangan pemenuhan ketersediaan baku pembanding. Di sisi lain, baku pembanding sangat diperlukan dalam memastikan produk obat dan makanan telah memenuhi standar keamanan, mutu dan khasiat yang dipersyaratkan. Lantas strategi apa yang perlu segera dilakukan dalam pemenuhan baku pembanding?"

Masih segar dalam ingatan kasus gagal ginjal akut progresif atipikal (GGAPA) pada anak beberapa waktu lalu. Investigasi dan pengujian terhadap sirup obat yang diduga mengandung cemaran etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) sempat terkendala karena ketersediaan baku pembanding yang harus diimpor. Sementara laporan kasus GGAPA terus meningkat. Hal ini merupakan salah satu contoh kasus betapa pentingnya ketersediaan baku pembanding.

Baku pembanding merupakan suatu bahan otentik dan homogen dengan kemurnian tertentu yang digunakan sebagai pembanding pada pengujian suatu zat kimia dalam sampel. Baku pembanding sangat penting dalam rangka menjamin ketertelusuran dan validitas hasil pengujian. Selain itu baku pembanding digunakan untuk memastikan produk telah memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu yang dipersyaratkan. Baku ini juga dibutuhkan dalam pengujian dan pengembangan produk baru.

Saat ini ketersediaan baku pembanding, baik dari segi jenis dan jumlahnya, belum mampu mengimbangi kebutuhan yang terus meningkat setiap tahunnya. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, ketergantungan pada importasi, serta mahal dan sulitnya memperoleh bahan baku, merupakan tantangan yang harus dihadapi.

Peran BPOM dalam Pemenuhan Baku Pembanding Nasional

BPOM melalui Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN) memiliki fungsi di



Total Baku Pembanding yang dikembangkan PPPOMN	727	jenis
- Baku Pembanding Farmakope Indonesia (BPI)	392	jenis
- Baku Pembanding Laboratorium (BPL)	335	jenis
Total BPI (di Monografi Farmakope Indonesia (FI) termasuk senyawa sejenis)	1077	jenis
- Persentase pemenuhan BPI	36,4	%
Total BPI (di Monografi selain senyawa sejenis)	854	jenis
- Persentase pemenuhan BPI	45,0	%

Tabel: Persentase Pemenuhan Baku Pembanding terhadap Farmakope Indonesia

bidang pengembangan baku pembanding. PPPOMN telah terakreditasi sebagai produsen baku pembanding sesuai persyaratan SNI ISO 17034:2016. Akreditasi ini merupakan pengakuan internasional terhadap kompetensi PPPOMN BPOM dalam memproduksi baku pembanding sehingga dapat diterima dan disandingkan dengan produsen baku pembanding negara lain di dunia.



Perwakilan Negara Anggota ASEAN pada Pertemuan ke-16 ASEAN Reference Substances Working Group di Bali (19/3/2024)

Baku pembanding produksi PPPOMN terdiri dari Baku Pembanding Farmakope Indonesia (BPFI), Baku Pembanding Laboratorium (BPL), dan Baku Pembanding Mikroba. Baku pembanding tersebut telah memberikan kontribusi dalam peningkatan jaminan mutu hasil pengujian. Pada pengawasan di daerah, baku pembanding diperlukan oleh unit pelaksana teknis BPOM dalam proses pengujian di laboratorium guna menunjang pengawasan obat dan makanan.

Pemenuhan baku pembanding merupakan pekerjaan besar yang memerlukan kerja sama dan dukungan dari pemangku kepentingan lainnya. Sejak 2021, BPOM telah meluncurkan strategi percepatan pemenuhan baku pembanding untuk pengujian obat dan makanan dengan menggandeng pihak akademisi, industri, dan kementerian/ lembaga guna memenuhi kebutuhan baku pembanding nasional.

Kolaborasi Baku Pembanding di Kawasan ASEAN

Negara anggota ASEAN lainnya juga menghadapi tantangan yang sama dalam pemenuhan kebutuhan baku pembanding. Berangkat dari kepentingan bersama ini, terbentuklah ASEAN Reference Substances Working Group (ARSWG). Namun sejak adanya perubahan struktur tata kelola sektor

kesehatan ASEAN pada 2016 proyek ini sempat vakum karena tidak masuk menjadi prioritas.

Meskipun demikian, BPOM menjadi inisiator dan berkolaborasi dengan negara ASEAN dalam mengembangkan baku pembanding. BPOM memfasilitasi pertemuan ASEAN Reference Substances (ARS) untuk membahas berbagai isu terkait baku pembanding. Pertemuan ini dilaksanakan pada 19--20 Maret 2024 di Denpasar, Bali dengan mengusung tema: *Strengthening ASEAN Collaboration in Producing Reference Standards that Comply with International Standards*.

Tujuan pertemuan ini untuk mendapatkan solusi strategis terhadap permasalahan produksi, distribusi, dan penanganan baku pembanding, meningkatkan kapasitas anggota ARSWG dalam pengujian dan produksi baku pembanding, serta memperkuat kolaborasi antar anggota. Pertemuan yang dilaksanakan secara *hybrid* tersebut selain menghadirkan perwakilan dari setiap negara anggota ASEAN, juga dihadiri oleh perwakilan BSN, BRIN, dinas kesehatan, akademisi, dan industri farmasi. Berbagai pembicara berasal dari WHO, PMDA Jepang, ASEAN Secretariat, dan Kementerian Kesehatan.

Pertemuan ARS ini mencapai kesepakatan dan komitmen negara ASEAN untuk berkolaborasi dalam

meningkatkan kapasitas dalam produksi, pengelolaan, dan pengembangan baku pembanding, dengan berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya. Kedepannya akan disusun rencana aksi untuk menjawab tantangan dan peluang terkait pengembangan baku pembanding. Selain itu, negara anggota juga bersepakat mengusulkan kembali ARS masuk ke dalam prioritas Program Kerja ASEAN 2026-2030 pada pilar kesehatan atau pilar ekonomi.

"Harapan kita untuk masa depan produksi baku pembanding Indonesia tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga mampu menghasilkan baku pembanding yang berdaya saing dengan baku pembanding produksi luar negeri untuk mewujudkan pengujian yang unggul, inovatif, dan adaptif untuk pengawasan obat dan makanan nasional," ungkap Plt. Kepala BPOM RI, L. Rizka Andalusia.

Pemenuhan baku pembanding bukan hanya isu nasional tetapi juga internasional. Kerja sama dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan, baik dalam negeri maupun internasional, diperlukan sebagai strategi percepatan pemenuhan baku pembanding. Dengan adanya kolaborasi ini diharapkan tantangan dan hambatan laboratorium yang membutuhkan baku pembanding untuk pengujian obat dan makanan dapat segera teratasi. ■



Ofis : Yanuar Rahman
Editor : Hendriq Fauzan K

Pemanfaatan Media Sosial oleh BPOM: Strategi dan Implementasi untuk Keterlibatan Publik yang Optimal

Pada era digital ini, media sosial telah menjadi sarana komunikasi yang sangat efektif bagi lembaga pemerintah seperti BPOM untuk menjalin keterlibatan yang lebih luas dan mendalam dengan masyarakat. Melalui platform ini, BPOM mampu menyebarkan informasi dengan cepat, mengatasi batasan geografis dan waktu, serta memungkinkan dialog dua arah yang berarti. Namun, di balik potensi besar tersebut, terdapat tantangan signifikan yang perlu diatasi untuk memastikan pengelolaan media sosial dilakukan secara efektif dan bertanggung jawab.



Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Noorman Effendi membuka kegiatan Meet the Admins 2024, di hadapan para admin media sosial di seluruh unit kerja BPOM, Bali (5/3/2024)

Dalam era di mana teknologi informasi mengubah lanskap komunikasi secara fundamental, media sosial telah menjadi kunci utama bagi instansi pemerintah untuk menjalin keterlibatan yang lebih dalam dengan masyarakat. Seiring dengan perkembangan digital yang pesat, penggunaan media sosial tidak hanya menjadi pilihan, tetapi sebuah kebutuhan strategis dalam memenuhi tuntutan transparansi dan partisipasi publik yang semakin tinggi.

Pemanfaatan media sosial bukan sekadar alat untuk menyebarkan informasi. Lebih dari itu, media sosial memungkinkan instansi untuk merespons secara langsung terhadap kebutuhan dan pertanyaan masyarakat dengan cepat dan tepat. Dengan demikian, gap antara pemerintah dan masyarakat dapat dipersempit, memungkinkan terbentuknya dialog dua arah yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Namun, penggunaan media sosial juga menghadapi tantangan yang tidak

bisa dianggap enteng. Risiko munculnya informasi yang salah atau negatif dapat merusak citra institusi. Untuk mengatasinya, instansi pemerintah perlu mengelola media sosial secara efektif dan bertanggung jawab. BPOM kemudian menetapkan standar operasional dengan menerbitkan Pedoman Pengelolaan Media Sosial. Langkah ini tidak hanya memastikan penggunaan media sosial yang strategis tetapi juga meningkatkan koordinasi antar unit dalam menyajikan informasi

yang akurat dan bermanfaat bagi masyarakat.

Strategi Pengelolaan Media Sosial BPOM

BPOM mengambil langkah proaktif dalam mengelola media sosialnya. Standar operasional untuk aktivitas media sosial di BPOM ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor 432 tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pedoman ini bukan hanya menjadi panduan bagi seluruh unit kerja dan UPT BPOM, tetapi juga memastikan bahwa setiap aktivitas humas digital dilakukan secara strategis dan mengikat.

Pedoman ini diarahkan untuk meningkatkan koordinasi antar unit dalam menyampaikan informasi yang akurat dan bermanfaat kepada masyarakat. Sosialisasi yang menyeluruh dan pemahaman mendalam terhadap pedoman ini menjadi kunci utama dalam memaksimalkan pengelolaan media sosial sebagai alat komunikasi publik, sekaligus memitigasi risiko yang dapat merugikan citra institusi.

"Meet The Admins: Meracik Informasi, Menarik Atensi"

Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan pengelolaan media sosial yang optimal, BPOM menyelenggarakan kegiatan "Meet The Admins: Meracik Informasi, Menarik Atensi". Kegiatan ini bertujuan tidak hanya untuk memperkenalkan pedoman baru kepada seluruh pelaksana media sosial BPOM, tetapi juga untuk memperkuat sinergi antar mereka. Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam pengelolaan konten media sosial, serta memperluas dampak positif terhadap kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan produk obat dan makanan.

Dalam 2 hari kegiatan yang diadakan, para admin media sosial dari seluruh unit kerja dan UPT BPOM berpartisipasi aktif. Acara ini mempertemukan mereka dengan berbagai narasumber, termasuk Farhan Noor Rachman dan Bagas Satria Pamungkas dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, yang berbagi strategi dalam



Tim media sosial BPOM menjelaskan tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial kepada para admin media sosial di seluruh unit kerja dan unit pelaksana teknis (UPT) BPOM, Bali (05/03/2024).

membangun interaksi publik dengan konten pemerintah. Narasumber lainnya, seperti Digital Creator dari Bali, Itakimo, memberikan wawasan tentang menggali kreativitas dalam pembuatan konten yang menarik dan berbeda dari yang lain. Dilanjutkan pada hari kedua, tim pengelola media sosial BPOM menyosialisasikan secara mendalam Pedoman Pengelolaan Media Sosial BPOM.

Kegiatan ini menjadi bukti nyata bagaimana instansi pemerintah mendorong inovasi dan kreativitas dalam pengelolaan media sosial. Melalui kegiatan ini, para admin media sosial dari berbagai unit kerja dan UPT BPOM berkolaborasi untuk menghasilkan konten yang informatif dan menarik, serta memperluas dampak positif terhadap kesadaran masyarakat tentang keamanan obat dan makanan.

Harapan dan Dampak Positif

Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Noorman

Effendi BPOM, menegaskan, "Media sosial memungkinkan BPOM untuk menyampaikan kebijakan dan informasi penting dengan cara yang transparan dan akuntabel. Kami berharap kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat signifikan bagi para admin media sosial BPOM, tetapi juga memungkinkan mereka untuk lebih optimal dalam memanfaatkan media sosial sebagai platform informatif, interaktif, dan menyenangkan bagi masyarakat."

Dengan demikian, langkah-langkah strategis BPOM dalam memanfaatkan media sosial tidak hanya bertujuan untuk memperluas jangkauan informasi publik, tetapi juga untuk membangun kepercayaan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan produk obat dan makanan. Ini merupakan salah satu contoh bagaimana pemerintah dapat mengadaptasi teknologi digital untuk meningkatkan pelayanan publik dan responsibilitas institusionalnya dalam era modern yang terkoneksi secara digital. ■



Oleh : Anggita Tyaswuri
Editor : Hendriq Fauzan Kustanto

Menuju Kemandirian Produk Obat Derivat Plasma (PODP) Melalui Lokakarya Penyusunan Plasma Master File

Indonesia memiliki sumber daya potensial dalam pengembangan produk obat derivat plasma (PODP). PODP berasal dari plasma darah manusia yang diambil dan dikelola oleh unit donor darah (UDD). Namun data Palang Merah Indonesia (PMI) tahun 2023 menunjukkan bahwa penggunaan plasma di Indonesia masih belum maksimal di mana setiap tahunnya hanya sekitar 1-10% plasma darah yang digunakan dalam pelayanan. Selebihnya, plasma darah akan dibuang menjadi limbah karena belum ada fasilitas fraksionasi plasma untuk mengolah plasma tersebut. Ironisnya, Indonesia masih bergantung 100% dari produk impor untuk memenuhi kebutuhan PODP.



Pit. Kepala BPOM bersama dengan para narasumber pada Workshop On Preparation of Plasma Master File in Indonesia, Jakarta (4/3/2024).

Pemenuhan mutu plasma darah sebagai bahan baku PODP merupakan tanggung jawab berbagai kementerian/lembaga, salah satunya BPOM. BPOM melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Perkembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan diberikan tugas untuk mengawal kemandirian industri farmasi. Dalam hal ini adalah pengawasan terhadap proses fraksionasi plasma menuju kemandirian PODP.

Upaya mencapai kemandirian tidak serta-merta semudah membalikan telapak tangan, tetapi melalui langkah demi langkah secara pasti. Sebagai langkah

awal Program Fraksionasi Plasma di Indonesia, Kementerian Kesehatan telah sepakat untuk melaksanakan fraksionasi plasma berdasarkan kontrak *contract plasma fractionation* (CPF) yang akan diikuti dengan pendirian perusahaan fraksionasi plasma nasional. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1349/2023 dan Nomor HK.01.07/Menkes/146/2023, terdapat 2 fasilitas fraksionasi plasma yang akan melakukan *roll* fraksionasi plasma.

Dalam pelaksanaan fraksionasi plasma berdasarkan kontrak tersebut, unit pengolahan darah (UDD) atau pusat plasma apheresis yang memiliki sertifikat GMP Pembuatan Obat yang

Baik (GPOB) akan menyediakan plasma untuk kemudian diolah oleh plasma fractionator di luar negeri. Peran BPOM dalam kemandirian adalah melakukan pengawasan yang dimulai dari hulu ke hilir. Pengawasan pada hulu dengan melakukan sertifikasi terhadap fasilitas produksi bahan baku sumber plasma untuk menghasilkan sumber plasma yang bermutu dan sesuai dengan pedoman GPOB. Berdasarkan data subalte klikopob.pom.go.id, saat ini terdapat 21 Unit Transfusi Darah (UTD) PMI dan UTD rumah sakit yang memiliki sertifikat aktif dan masih berlaku. Mereka berkomitmen dapat menyediakan plasma sebanyak 200.000 liter/tahun.



Penyampaian materi oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, pada Workshop On Preparation of Plasma Master File in Indonesia, Jakarta (4/3/2024).

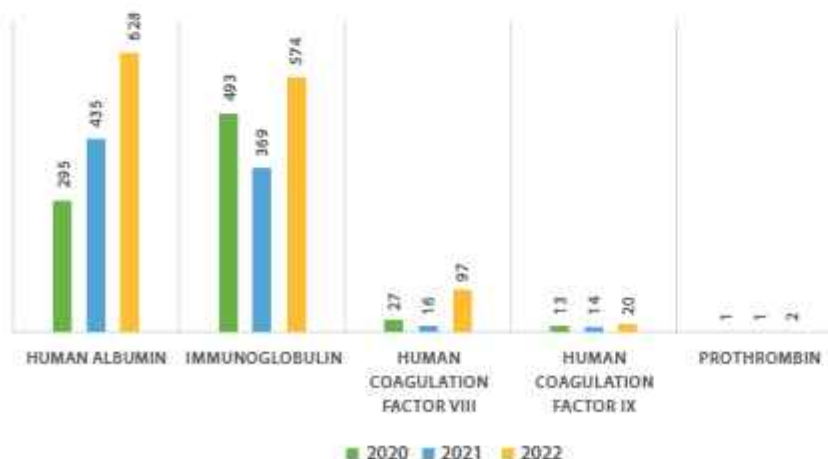
Salah satu ketentuan untuk *contract plasma fractionation* adalah setiap UDD bersertifikat OPOB yang akan menyediakan plasma untuk OPF harus mengembangkan plasma master file (PMF). PMF mencakup semua informasi rinci yang relevan mengenai karakteristik seluruh plasma manusia yang digunakan sebagai bahan awal dan/atau bahan mentah untuk pembuatan subfraksi/ fraksi perantara, unsur eksipien, dan zat aktif. Bahan awal tersebut merupakan bagian dari produk kesehatan atau alat kesehatan yang mengandung turunan

stabil dari darah manusia atau plasma manusia. PMF yang dibuat oleh UDD akan direviu oleh BPOM saat proses registrasi PODP.

Sebagai upaya dalam mempersiapkan PMF, BPOM terus berupaya untuk memastikan kemandirian dan *sustainability* darah lokal dan produk derivat plasma darah yang bermutu, aman, dan andal sehingga Indonesia memiliki sistem kesehatan yang lebih tangguh, serta meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara keseluruhan di negara ini. Salah satu yang telah

dilakukan adalah pendampingan melalui lokakarya yang diselenggarakan pada 4--6 Maret 2024 di Jakarta. Lokakarya ini diikuti oleh UDD tersertifikasi OPOB di Indonesia dan dihadiri oleh perwakilan dari WHO Indonesia dan Kementerian Kesehatan. Selain itu, kegiatan ini melibatkan ahli dari Institute of Food and Drug Safety Evaluation-Republic of Korea, National Blood Center-Korean Red Cross, dan Fraksionator Plasma dari Korea Selatan. Tenaga ahli dari institusi di Korea Selatan dipilih karena Indonesia telah menunjuk fraksionator Korea Selatan untuk Program OPF. Terlebih, Korean Red Cross telah memiliki pengalaman panjang dalam mengirimkan plasma mereka ke fraksionator di negaranya.

Lokakarya bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan pemahaman UDD dalam menyusun PMF, tetapi juga meningkatkan kompetensi BPOM dalam menilai PMF, termasuk bagi Kementerian Kesehatan dalam memantau kebijakan fraksionasi plasma berdasarkan kontrak (*contract plasma fractionation/ OPF*) di Indonesia. Setelah lokakarya ini, diharapkan BPOM, Kementerian Kesehatan, UDD, dan fraksionator akan memiliki keselarasan mengenai PMF yang sebaiknya dikembangkan untuk plasma Indonesia dan dapat membawa manfaat nyata bagi peningkatan kesehatan masyarakat Indonesia. ■



Data Kenaikan importasi Produk Obat Derivat Plasma (per setiap vial/botol)
(Sumber : BPOM, 2023)



Oleh : Qori Yasinta
Editor : Hendriq Fauzan Kustanto

Kolaborasi, Capai *Patient Safety*

Patient safety atau keselamatan pasien merupakan prioritas utama dalam pelayanan kesehatan yang sangat erat kaitannya dengan keamanan obat. Sebagai Pusat Farmakovigilans/MESO Nasional, peran BPOM dalam mengawal dan mengawasi keamanan obat/vaksin beredar di Indonesia sangat vital. Oleh karena itu pengawasan keamanan obat beredar melalui aktivitas farmakovigilans harus dilakukan secara berkesinambungan.

Pada 2023, BPOM telah menerima 13.166 laporan kejadian tidak diinginkan/efek samping obat/kejadian ikutan pasca imunisasi (KTD/ESO/KIPI) dari tenaga kesehatan dan industri farmasi. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2019--2023) terjadi peningkatan jumlah laporan KTD/ESO/KIPI yang diterima BPOM. Data menunjukkan tenaga kesehatan menjadi pelapor KTD/ESO/KIPI terbanyak. Tenaga kesehatan sebagai garda terdepan di sarana pelayanan kesehatan menjadi *key players* yang sangat berperan penting dalam pengawasan keamanan obat. Selain tenaga kesehatan, industri farmasi sebagai pemilik izin edar produk juga bertanggung jawab terhadap produk yang diedarkan di Indonesia.

Meskipun tren pelaporan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, jumlah laporan yang diterima masih relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Indonesia. Jumlah pelaporan yang relatif masih kecil tersebut, dapat menggambarkan kemungkinan adanya risiko keamanan obat yang tidak teridentifikasi sehingga tidak dapat dilakukan tindakan pencegahan yang efektif.

Selama ini kegiatan farmakovigilans di praktik pelayanan kesehatan dan pelayanan kefarmasian masih bersifat pasif dan bergantung kepada partisipasi sukarela dari tenaga kesehatan. Hal ini menyebabkan Indonesia belum memiliki gambaran profil keamanan penggunaan obat dengan berbasis populasi Indonesia. Monitoring dan dokumentasi efek samping obat yang dilakukan masih sebatas upaya internal di masing-masing institusi kesehatan dalam menjamin



Advokasi Pembentukan Kelompok Kerja Pengkajian Keamanan Obat di Jawa Timur dengan akademisi, asosiasi profesi kesehatan, dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur di Surabaya (27/6/2024)



Tren jumlah pelaporan KTD/ESO yang diterima BPOM pada Tahun 2019–Juni 2024

keselamatan pasien. Maka dari itu, BPOM terus melakukan berbagai upaya untuk mendorong partisipasi tenaga kesehatan agar mengidentifikasi dan melaporkan KTD/ESO/KIPI kepada BPOM dan melakukan intensifikasi penerapan farmakovigilans bagi industri farmasi.

Untuk penguatan farmakovigilans obat, BPOM berkolaborasi dengan pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan dari lintas sektor terkait antara lain Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan, organisasi profesi kesehatan, akademisi, dan fasilitas pelayanan kesehatan. Salah satu bentuk kolaborasi dengan implementasi MESO Aktif yaitu pengembangan sistem pelaporan yang terintegrasi antara Sistem Informasi

Tuberkulosis (SITB) dengan e-MESO BPOM, penyusunan Petunjuk Teknis Monitoring dan Manajemen Efek Samping Obat secara Aktif (MESO Aktif) pada Pengobatan TBC Resisten Obat di Indonesia, serta pertukaran data keamanan (*safety data exchange*) dengan KOMNAS PP KIPI. Kolaborasi ini mendorong tenaga kesehatan sebagai garda terdepan di fasilitas kesehatan untuk melaporkan KTD/ESO/KIPI ke BPOM. Laporan ini dapat memperkuat upaya jaminan keamanan obat, keselamatan pasien serta perlindungan kesehatan masyarakat di Indonesia.

Sistem vigilans yang baik, akan mendukung BPOM sebagai regulator pengawasan obat dan makanan yang mumpuni, menjadi rujukan baik di level

nasional maupun internasional. Termasuk di antaranya pemenuhan sistem farmakovigilans yang terstruktur mulai dari tingkat nasional, subnasional, sampai fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan capaian tersebut, BPOM memperoleh dukungan dalam memenuhi persyaratan WHO untuk menjadi WHO-Listed Authority serta mendapat kepercayaan dalam mengawal produk obat/vaksin di Indonesia.

Satu laporan yang masyarakat sampaikan akan menjadi database BPOM dalam mendeteksi sinyal keamanan obat dan vaksin. Laporan-laporan yang terkumpul dan dikaji akan menghasilkan keputusan penting terkait keamanan pasien. Pembekuan izin edar dan penarikan produk Polioresulen tahun 2018 terkait risiko *chemical burn & serious adverse drug reaction in stomatitis treatment*; pencabutan izin edar *chloroquine* dan pencabutan emergency use authorization (EUA) *hydroxychloroquine* tahun 2020 terkait risiko QT prolongation (*evaluation on safety of hydroxychloroquine and chloroquine post EUA*); dan update label/informasi terkait potensi risiko *ischaemic colitis* pada penggunaan Nintedanib tahun 2023, telah menjadi bukti pentingnya laporan KTD/ESO/KIPI. Semakin banyak laporan KTD/ESO/KIPI yang diterima, maka semakin jelas bagi BPOM untuk menentukan tindak lanjut yang sesuai, sehingga BPOM dapat mendeteksi dini terkait isu keamanan obat/vaksin dan mencegah dampak risiko yang lebih luas.

Mari turut mengawal keamanan obat dan vaksin dengan melaporkan KTD/ESO/KIPI kepada BPOM melalui aplikasi e-Meso. Satu laporan dapat membawa perubahan (*One Report Can Make Difference*). ■

No	Nama Negara	Jumlah Laporan	Persentase
1	Amerika Serikat	16.539.768	42,3%
2	Korea Selatan	3.132.100	8,0%
3	China	2.616.197	6,4%
4	Inggris dan Irlandia Utara	1.909.961	4,9%
5	Jerman	1.673.489	4,3%
13	Thailand	522.139	1,3%
16	Singapura	356.341	0,9%
19	Malaysia	296.629	0,8%
28	Filipina	166.889	0,4%
55	Indonesia	36.992	0,1%

Laporan KTD/ESO/KIPI yang diterima oleh WHO–Uppsala Monitoring Centre
Sumber: <https://vigilance.who-umc.org/>

“
To know of something that is harmful to another person, who does not know, and not telling is unethical.”
Ethics in Pharmacovigilance
– WHO



TAHUKAH KAMU?

STUNTING

dapat mengganggu perkembangan mental, pola pikir, dan perkembangan fisik yang berdampak pada:

1

Rendahnya kualitas dan produktivitas sumber daya manusia

2

Rendahnya tingkat kesehatan dan ekonomi



PENYEBAB STUNTING

1

Kekurangan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan (masa awal terbentuknya janin di dalam kandungan (270 hari) hingga 2 tahun pertama kehidupan)

2

Penyakit infeksi yang dapat disebabkan oleh konsumsi pangan yang tidak aman



Kejadian penyakit infeksi yang berulang dapat menyebabkan gangguan kecukupan gizi kronis pada pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita.

Jika kekurangan asupan gizi kronis terjadi pada ibu hamil dan bayi, maka dapat menyebabkan terjadinya *stunting* pada anak balita.



UPAYA MEMUTUS DAMPAK **STUNTING**

1



Tingkatkan kandungan gizi pangan dengan fortifikasi pangan

2



Berikan makanan bergizi seimbang bagi calon ibu, ibu hamil, dan juga anak usia di bawah 3 tahun

3



Jaga keamanan dan mutu pangan

CEGAH **STUNTING**

dengan selalu menjaga keamanan pangan agar terbebas dari 3 cemaran

1 Cemaran kimia

- Racun alami yang ada dalam pangan
Contoh: asam sianida pada singkong yang telah berwarna biru kehijauan
- Bahan kimia berbahaya yang disalahgunakan pada pangan
Contoh: formalin pada mi basah, boraks pada bakso, pewarna tekstil pada kerupuk
- Bahan tambahan pangan yang digunakan melebihi takaran
- Residu pestisida



2 Cemaran Biologi

- Bakteri, kapang, khamir, virus, dan lain-lain
Contoh: kapang *Rhizopus stolonifer* pada roti; *E.coli* pada es batu



3 Cemaran Fisik

- Kontaminasi benda fisik pada pangan
Contoh: kerikil pada beras, tanah pada sayuran, staples pada makanan, dll



...lawan *stunting*, pastikan pangan bebas dari cemaran...



Oleh : Chandra Wino Adhanunggar
Editor : Dian Hermawati

BPOM Raih 4 Penghargaan

Pada Ajang The 9th Public Relations Indonesia Awards 2024



Piala penghargaan pada ajang The 9th PRIA 2024

D i awal tahun 2024, BPOM berhasil membawa pulang 4 penghargaan dari ajang The 9th Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2024 yang diselenggarakan oleh Public Relations Indonesia. Keempat penghargaan tersebut diberikan pada puncak acara yang dilaksanakan pada Kamis (7/3/2024).

Empat penghargaan ini diperoleh setelah melalui proses penjurian yang berlangsung dari tanggal 23 hingga 26 Januari 2024. Dewan juri memilih karya-karya PR terbaik dari instansi/lembaga/organisasi/perusahaan dan menetapkan penerima penghargaan yang terbagi ke dalam beberapa kategori. Kategori yang dihadirkan pada ajang PRIA tahun

BPOM RI menerima penghargaan Silver Winner untuk kategori Kanal Digital subkategori Media Sosial Instagram





Asmono Wikan menyerahkan penghargaan kepada BPOM RI

Ini mencakup berbagai aspek dari *public relations*, seperti Kampanye PR Terbaik, Manajemen Krisis, Tanggung Jawab Sosial, PR Digital, dan lain-lain. Para pemenang diakui karena strategi komunikasi yang efektif, kreativitas dalam *storytelling*, dan kemampuan untuk menciptakan dampak positif bagi instansi/lembaga/organisasi/perusahaan dan masyarakat.

Hasil penilaian dewan juri tersebut menetapkan BPOM meraih penghargaan, yaitu (1) Silver Winner untuk kategori Kanal Digital subkategori Media Sosial Instagram, (2) Bronze Winner untuk kategori Departemen PR, (3) Bronze Winner untuk kategori Manajemen Krisis subkategori Pra-Krisis, dan (4) Bronze Winner kategori Manajemen Krisis subkategori Krisis & Pasca-Krisis.

The 9th PRIA 2024 sendiri merupakan sebuah acara penghargaan yang diselenggarakan oleh Public Relations (PR) Indonesia untuk menghormati prestasi dan keunggulan di bidang kehumasan bagi para insan

kehumasan. Acara ini merupakan salah satu platform utama di Indonesia yang mengakui pencapaian luar biasa dalam pelaksanaan *public relations* atau kegiatan kehumasan dalam sebuah organisasi/institusi/lembaga/perusahaan, serta mempromosikan inovasi dan praktik terbaik dalam komunikasi.

Melalui website prindonesia.co, disebutkan bahwa pada tahun 2024 terdapat 699 karya dari 219 institusi yang diterima oleh PR Indonesia dengan berbagai kategori. Kategori tersebut antara lain Owned Media, Kanal Digital, Manajemen Krisis, Laporan Tahunan, Program PR, Departemen PR, dan Komunikasi corporate social responsibility (CSR). Ada 16 juri dari kalangan praktisi PR senior, jurnalis, akademisi, hingga PR Guru yang dilibatkan dalam proses penjurian terhadap karya-karya tersebut.

"Pemenang yang kami cari adalah mereka yang mampu menunjukkan gagasan-gagasan segar dan berani mengambil inisiatif untuk lebih inovatif dan kreatif," ungkap Founder dan Chief

Executive Officer (CEO) PR INDONESIA Asmono Wikan.

Salah satu aspek penilaian yang mendapat perhatian serius dari para juri adalah strategi komunikasi terstruktur terhadap program PR. Asmono Wikan juga mengajak seluruh praktisi PR yang hadir untuk bersama bergerak mengelola dan menjaga agar aktivitas komunikasi strategis dapat menyumbang tumbuhnya peradaban bangsa yang lebih baik dari waktu ke waktu.

Capaian penghargaan ini diharapkan dapat menjadi suntikan semangat bagi jajaran BPOM untuk terus menaati dan mengembangkan inovasi-inovasi program dan kegiatan di bidang kehumasan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Tidak hanya transparan dalam menyampaikan informasi yang akurat, kredibel, dan efektif, melainkan juga mampu berkolaborasi dan bersinergi dengan berbagai pihak dalam melakukan kegiatan yang mendukung tumbuhnya peradaban bangsa yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat. ■

**Tahukah
Kamu**

3 Produk Pangan yang

Wajib Fortifikasi Pangan



1 Minyak Goreng Sawit



2 Tepung Terigu



3 Garam

Tujuan Fortifikasi Pangan

Untuk mengatasi masalah gizi nasional pada masyarakat Indonesia, khususnya untuk percepatan perbaikan gizi anak Indonesia melalui penambahan zat gizi mikro atau jenis dan komposisi zat gizi dan/atau pemberlakuan persyaratan khusus pada pangan tertentu.



Pengawasan BPOM terhadap Pangan Olahan Wajib Fortifikasi

Praedar

Registrasi Produk:

- Mutu dan keamanan produk
- Hasil penerapan cara produksi pangan olahan yang baik dan ketertelusuran
- Kesesuaian fortifikan (jenis dan jumlah)
- Informasi pada label

Pascaedar

Sampling dan Pengujian Produk:

- Mutu dan keamanan produk
- Kesesuaian fortifikan (jenis dan jumlah)
- Legalitas produk
- Informasi pada label

..Cek KLIK

(Kemasan, Label, Izin edar, Kedaluwarsa) dulu sebelum pilih produk garam, tepung terigu, dan minyak goreng sawit..





BPOI menyelenggarakan pelatihan pengawasan obat dan makanan kepada perwakilan Kementerian Kesehatan Palestina dalam rangka memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan Palestina di Amman, Yordania (21-22/5/2024)



Ditulis : Nelly Rachman
Editor : Dian Hermawati

Dari Indonesia Untuk Palestina

Palestina selalu menempati posisi istimewa di hati Bangsa Indonesia. Sejak awal kemerdekaan, Indonesia secara konsisten mendukung perjuangan Palestina untuk meraih kemerdekaan dan kedaulatan penuh sebagai sebuah negara. Indonesia tak segan menunjukkan perhatian dan dukungannya bagi Palestina di berbagai forum internasional, baik melalui diplomasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia. Palestina selalu menjadi salah satu penerima manfaat terbesar dari bantuan Indonesia dalam pembangunan kapasitas.

Sejak 2008, Indonesia telah menyediakan tidak kurang dari 177 program pembangunan kapasitas melalui kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) untuk hampir 2.000 warga Palestina. Program tersebut mencakup berbagai sektor, seperti keuangan, kesehatan, tata kelola pemerintahan yang baik, pemberdayaan perempuan, pelatihan diplomatik, hingga pariwisata.

Tahun 2022 merupakan salah satu tahun bersejarah bagi Indonesia dan Palestina. Pemerintah Indonesia, melalui BPOM, bersama Kementerian Kesehatan Palestina yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Palestina, menandatangani Memorandum of Understanding (MoU). Penandatanganan dilakukan di sela-sela pertemuan bilateral antara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh di Istana Bogor pada Senin, 24 Oktober 2022.

Penandatanganan MoU tersebut adalah bentuk fasilitasi pendampingan BPOM dalam pembentukan otoritas pengawas obat dan makanan Palestina yang independen. Sebagai langkah kerja sama strategis, MoU tersebut khususnya mengatur kerja sama di bidang fungsi regulatori terkait produk farmasi, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Peningkatan Kapasitas di Bidang Regulasi Obat dan Makanan

Di tengah konflik yang masih memanas, BPOM terbang ke Amman, Yordania untuk memberikan pelatihan pengawasan obat dan makanan kepada perwakilan Kementerian Kesehatan Palestina pada 21--22 Mei 2024. Peningkatan kapasitas bagi



Director of Pharmaceutical Registration, Ministry of Health of Palestine Dr. Mustofa Alnadi

regulator Palestina ini sangat penting untuk memastikan pasokan obat dan makanan yang masuk ke Palestina tetap aman dan berkualitas.

Amman dipilih menjadi tempat pelatihan dengan mempertimbangkan situasi keamanan di Palestina. Sebanyak 15 peserta menempuh perjalanan darat dari kota Ramallah di Palestina melintasi perbatasan Allenby Bridge dan King Hussein Bridge Border untuk mengikuti pelatihan tersebut.

Pada kesempatan tersebut, Director of Pharmaceutical Registration, Ministry of Health of Palestine Dr. Mustofa Alnadi mengungkapkan terima kasihnya kepada pemerintah Indonesia atas dukungan tiada henti terhadap otoritas regulasi Palestina, khususnya otoritas regulasi obat-obatan dan makanan. Saat ditanya pendapatnya mengenai kolaborasi program peningkatan

kapasitas di bidang regulasi obat dan makanan di Palestina, Mustofa Alnadi mengatakan BPOM berperan sangat penting dalam mendukung pembentukan Food and Drug Administration (FDA) Palestina pertama yang independen. Selain itu, BPOM juga berperan dalam pembangunan kapasitas dan pengembangan peraturan sekaligus peningkatan ketahanan negara Palestina.

Menurutnya, berkat dukungan Indonesia dalam mendukung ketahanan rakyat Palestina, memungkinkan Palestina memperkuat upaya membangun lembaga-lembaga di Palestina. Di tengah krisis kemanusiaan yang berkelanjutan, Gaza menerima donasi makanan dan obat dalam jumlah sangat banyak.

Namun, karena terjadi pemutusan komunikasi antara rakyat Palestina dan



“ ...pelatihan bagi sumber daya manusia (SDM) otoritas obat dan makanan di Palestina merupakan hal penting untuk membantu membangun kapasitas otoritas regulasi Palestina. Pelatihan ini akan membantu memperbaiki situasi dan meningkatkan kemandirian kami.

-Dr. Mustofa Alnadi-



Indonesia, dalam hal ini BPOM didukung Duta Besar Indonesia untuk Yordania dan Palestina, sap bermitra dengan Pemerintah Palestina dalam membangun badan pengawas yang kuat dan independen.

dua komponen utama Palestina, yaitu Tepi Barat dan Gaza, donasi yang dikirim berbagai pihak belum dapat disampaikan sepenuhnya kepada rakyat Palestina: "Kami sedang berusaha sebaik mungkin untuk menyampaikan dukungan bagi rakyat kami di Gaza," ungkap Mustofa Alnadi.

Kemandirian Otoritas Palestina

Sejak 2018, BPOM telah aktif menyelenggarakan beberapa pelatihan teknis untuk peningkatan kapasitas regulator Palestina. Berbagai pelatihan

tersebut, antara lain program Strengthening Cooperation in the Field of Drug Control through Knowledge Sharing (14-19 Oktober 2018 di Jakarta); pelatihan Good Regulatory Practice in Medicine (5-6 Oktober 2019 di Amman, Yordania); Virtual Training Program KSS bagi Regulator Obat dan Makanan Palestina (23-25 November 2020 di Jakarta, Indonesia dan Ramallah, Palestina); dan Virtual Training lanjutan Program KSS bagi Regulator Obat dan Makanan Palestina (20-22 September 2022 di Jakarta, Indonesia

dan Ramallah, Palestina).

Mustofa Alnadi mengakui bahwa pelatihan bagi sumber daya manusia (SDM) otoritas obat dan makanan di Palestina merupakan hal penting untuk membantu membangun kapasitas otoritas regulasi Palestina. "Pelatihan ini akan membantu memperbaiki situasi dan meningkatkan kemandirian kami," ujarnya. Sebagian besar topik pelatihan yang dibahas serta pengalaman-pengalaman yang dibagikan BPOM, termasuk terkait laboratorium, memiliki pengaruh besar pada otoritas regulasi Palestina dan sangat bermanfaat untuk SDM otoritas Palestina.

Melalui dukungan tanpa batas tersebut, Palestina dapat merasakan kehangatan dan keramahan dari masyarakat dan pemerintah Indonesia. Ia menutup wawancara dengan kembali menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada masyarakat Indonesia atas dukungannya yang mau berdiri bersama rakyat Palestina untuk membangun kembali negeri Palestina. ■

Harapan Indonesia untuk Palestina



Ade Padmo Sarwono
Duta Besar RI untuk Yordania dan Palestina

Pada kesempatan kunjungan ke Amman, Yordania beberapa waktu lalu, BPOM sempat berbincang dengan Duta Besar RI untuk Yordania dan Palestina Ade Padmo Sarwono. Ia menyebut ada 3 bentuk dukungan yang selama ini diberikan oleh Indonesia kepada Palestina, yaitu dukungan politik pemerintah Indonesia terhadap perjuangan Palestina, bantuan kemanusiaan baik kepada warga Palestina di Gaza maupun para pengungsi Palestina di Yordania, dan peningkatan kapasitas pemerintah Palestina.

"Itu semua merupakan bagian dari dukungan komprehensif Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina. Jadi bukan sekadar politik, bukan sekadar bantuan kemanusiaan, tapi terutama bantuan *capacity building*," tuturnya.

Ade Padmo Sarwono mengungkapkan

bahwa pemerintah Palestina menghadapi banyak tantangan dalam menyediakan layanan kesehatan, terutama di Tepi Barat yang masih diduduki Israel. Hal ini terus menunda upaya Palestina untuk memberikan layanan kesehatan terbaik bagi warganya karena adanya penjagaan ketat pada sistem pengawasan obat-obatan. Untuk itu, program peningkatan kapasitas melalui pelatihan dari BPOM diharapkan dapat semakin meningkatkan pengetahuan dan kompetensi pejabat Kementerian Kesehatan Palestina.

Lebih rinci, ia mengatakan bahwa pihaknya terus mengupayakan berbagai inisiatif agar pemerintah dan bangsa Indonesia dapat terus memberikan manfaat bagi rakyat Palestina. "Indonesia akan terus membangun kerja sama yang positif dengan Yordania dan Palestina," tegas Ade Padmo Sarwono. ■

INFORMASI PERATURAN SEPUTAR OBAT DAN MAKANAN



Mau mulai bisnis produk kosmetik, gimana cara dapat izin edar BPOM-nya, ya?

Iklan suplemen kesehatan yang sesuai ketentuan itu kayak gimana sih?

Biaya pendaftaran produk pangan olahan kalau mau dapat izin edar BPOM, mahal gak sih?

Kalau mau beli obat dari luar negeri, ada ketentuannya gak sih?

JDIH JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

<https://jdi.hpom.go.id/>

Peraturan yang dapat diakses melalui JDIH BPOM



* NAPPZA: Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

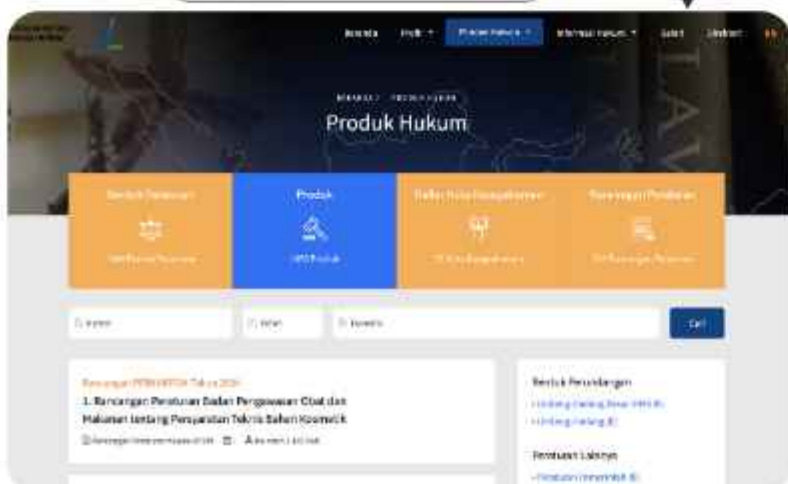
JDIH BPOM juga dilengkapi dengan:

- ✓ **Buletin Hukum**
- ✓ **Kajian/Analisis Hukum**
- ✓ **Jurnal Hukum**

Cara mengakses peraturan melalui JDIH

1. Pencarian melalui "Jenis/Kategori Produk Hukum"
2. Pencarian melalui "Nomor" peraturan
3. Pencarian berdasarkan "Tahun" peraturan
4. Pencarian berdasarkan "Subjek/Tentang" (judul/hal yang terkait dalam peraturan)
- ▶ Kemudian klik "Cari"

Contoh hasil pencarian



...tingkatkan literasimu, akses JDIH BPOM untuk cari tahu peraturan terkait obat dan makanan..



GALERI

Penulis : M. Rizzy
Editor : Dian Hermawati

Intensifikasi Pengawasan Ramadan dan Idulfitri 1445 H



BPOM menggelar konferensi pers, terkait hasil intensifikasi pengawasan pangan selama Ramadan dan Idulfitri 1445 H (Jakarta (1/4/2024). Hasilnya, ada total temuan 188.640 pieces pangan tanpa izin edar (TIE), kedaluwarsa, dan rusak senilai lebih dari Rp2,2 miliar yang diamankan dari 628 sarana penjualan pangan di jalan.

(Foto: Hendriq, Chandra/HumasBPOM)

HUT KE-23 BPOM



BPOM peringati Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke-23 pada 31 Januari 2024. Di momen puncak peringatan HUT, Minggu (4/2/2024), BPOM mengundang seluruh mitra kerja sebagai bentuk apresiasi atas kerja sama dan kolaborasi yang terbangun dalam memastikan pengawasan obat dan makanan di awal hingga ke pelosok negeri.

(Foto: Benny, Hendriq, Rahmadi/HumasBPOM)

PEMUSNAHAN MILKBUN



Petugas Food Inspector BPOM musnahkan ribuan pieces Milk Bun asal Thailand yang TMK dengan cara dibakar dalam tungku pembakaran (insinerator), Tangerang (8/3/2024). Milk Bun yang dimusnahkan adalah hasil penindakan terhadap barang bawaan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta selama Februari 2024.

(Foto: Hendriq/HumasBPOM)

INTENSIFIKASI PENGAWASAN KOSMETIK



Selama periode 19-23 Februari 2024, BPOM melakukan intensifikasi pengawasan kosmetik serentak bersama 76 LIPT di seluruh Indonesia. Melalui Media Briefing terkait Hasil Intensifikasi Pengawasan Kosmetik pada Klinik Kecantikan Tahun 2024, Rabu (3/4/2024), BPOM ungkap temuan produk kosmetik yang melanggar ketentuan senilai Rp2,8 miliar, termasuk temuan skincare beretiket biru yang tidak sesuai ketentuan.

(Foto: Devi, Masuwi/HumasBPOM)



Oleh : Ratna Wildi Astuti
Bakal Besar POM
di Yogyakarta
Editor : Dian Hermawati

BERPENDAR: Bersama Pendampingan UMKM untuk Memperoleh Izin Edar

BERPENDAR adalah inovasi dalam program pendampingan UMKM melalui kolaborasi pentaheliks, yaitu unsur pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media. Inovasi bertujuan meringankan beban pembiayaan pelaku usaha, pendampingan yang terprogram, dan mempercepat proses pendaftaran produk sampai terbit NIE dengan memperkuat kolaborasi dan sinergi lintas sektor pendamping UMKM di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pelaku UMKM seringkali terkendala dalam hal pembiayaan usaha dan ketidaktautan tentang proses pendaftaran produknya untuk mendapatkan nomor izin edar (NIE). Untuk itu, BPOM melalui BBPOM di Yogyakarta menginisiasi inovasi BERPENDAR (Bersama Pendampingan UMKM untuk Memperoleh Izin Edar). Hadirnya inovasi ini merupakan bentuk upaya BPOM untuk mendorong laju pertumbuhan pangan olahan sekaligus mendorong perekonomian, khususnya di wilayah DIY. BERPENDAR telah memperoleh apresiasi dari KemenPANRB sebagai Top 99 inovasi kelompok umum dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun 2023.

Kehadiran BERPENDAR dilatarbelakangi dari masih adanya paradigma di kalangan UMKM bahwa proses pendaftaran izin edar pangan olahan di BPOM mahal, rumit, dan lama. Faktor kurangnya pengetahuan tentang syarat, prosedur, serta biaya, menjadikan sedikit UMKM yang mengantongi izin edar BPOM, khususnya di wilayah DIY.

Pembiayaan yang dibutuhkan, antara lain untuk keperluan pengujian laboratorium (uji cemaran mikrobiologi, logam berat, dan kandungan nilai gizi), uji F nol (angka kecukupan panas untuk produk pangan steril komersial/PSK), dan biaya penerimaan negara

bukan pajak (PNBP) dalam rangka registrasi pangan olahan. Total biaya yang dibutuhkan berkisar antara 3--12 juta rupiah/produk. Biaya ini cukup memberatkan bagi pelaku usaha yang baru memulai usaha dengan modal yang terbatas. Pada tahun 2019, jumlah UMKM pangan di DIY sebanyak 66 UMKM dengan pertumbuhan rata-rata 10 UMKM/tahun.

KemenPANRB menyambangi secara langsung kantor BBPOM di Yogyakarta untuk kunjungan lapangan terkait implementasi inovasi BERPENDAR. Kunjungan dipimpin oleh Asisten Deputi Koordinasi dan Fasilitas Strategi Pengembangan Praktik Terbaik Pelayanan Publik KemenPANRB Ajib Rakhmawanto, Kamis (4/3/2024). "Baru kali ini saya menemukan dana keistimewaan di daerah digunakan untuk memfasilitasi kegiatan instansi pusat", ujar Ajib Rakhmawanto dalam sambutannya.

Implementasi BERPENDAR dalam proses kolaborasi memperoleh dukungan dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang membantu menganggarkan dan memfasilitasi pelaksanaan inovasi. Tahapan implementasi yang dilakukan, antara lain 1) advokasi dan koordinasi lintas sektor tentang pendampingan obat dan makanan; 2) seleksi dan penetapan target UMKM pangan olahan yang akan didampingi; 3) bimbingan teknis cara

pembuatan pangan olahan yang baik (OPPOB); 4) desk konsultasi dalam rangka Izin Penerapan OPPOB dan registrasi pangan olahan; 5) fasilitasi uji produk secara gratis; 6) crash Program Percepatan Evaluasi Registrasi Pangan Olahan bersama Direktorat Registrasi Pangan Olahan; dan 7) monitoring dan evaluasi program pendampingan pangan olahan.

Dukungan kolaborasi pentaheliks yang terjalin bersinergi sesuai dengan tugas dan kewenangan dari masing-masing unsur, yaitu:

1. **Unsur pemerintah.** Lintas sektor dan organisasi perangkat daerah (OPD) yang secara aktif telah berkolaborasi adalah:
 - a. Paniradya Pati Kaistimewan DIY. "Dana Khusus" dari APBN berupa Dana Keistimewaan, melalui OPD, telah memberikan fasilitasi lebih dari Rp4 M untuk kegiatan pendampingan pangan olahan di wilayah DIY.
 - b. Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan (BRIN) telah memfasilitasi produk pangan steril komersial dengan berbagai varian produk, seperti gudeg, tempe bacem, tonggeng, rendang, ayam bumbu pedas, bakso, dll.
 - c. Dinas OPD Provinsi DIY, yang memfasilitasi penyelenggaraan bimbingan teknis OPPOB, biaya uji laboratorium, biaya uji F nol

(khusus produk PSK), dan biaya PNPB dalam rangka registrasi pangan olahan.

- d Dinas OPD kabupaten/kota, yang juga memfasilitasi biaya uji produk, juga perbaikan sarana prasarana.

2. **Unsur akademisi.** Dukungan tenaga ahli dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam pengujian F nol. Melalui program Pangan Aman Goes to Campus (PAGO), pendampingan UMKM juga berkolaborasi bersama perguruan tinggi dengan menerjunkan mahasiswa secara langsung di lapangan.
3. **Pelaku usaha.** Sebanyak 396 produk pangan olahan UMK telah terfasilitasi gratis dalam proses pengujian dan registrasi pangan olahan.
4. **Komunitas Orang Tua Angkatan (OTA)** digawangi oleh PT Sari Husada Generasi Mahardika, Tok, dan PT Tigaraksa Satria, Tok sebagai OTA
5. **Media.** Dukungan media sebagai publikasi baik secara internal melalui media sosial BBPOM di Yogyakarta maupun media massa eksternal.

Sejauh ini, inovasi BERPENDAR telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan jumlah UMK di DIY yang mendapatkan NIE dari 66 UMKM (tahun 2019) menjadi 486 UMKM (tahun 2023). Selain juga berhasil meningkatkan NIE pangan olahan BPOM yang terbit tiap tahun dari 131 NIE/tahun (tahun 2019) menjadi 938 NIE/tahun (tahun 2023).

Kehadiran BERPENDAR juga berhasil mengkolaborasi program dan anggaran lintas sektor di DIY untuk memfasilitasi 396 UMKM selama tahun 2020-2024. Berkat fasilitasi tersebut, biaya yang seharusnya ditanggung oleh pelaku usaha antara Rp3-12 juta/produk menjadi gratis. Melalui inovasi tersebut, 80,95% pelaku usaha yang sudah terfasilitasi hingga memperoleh NIE dan berhasil meningkatkan omset penjualan produk dari para pelaku usaha tersebut.

Dengan dampak positif yang dihasilkan, inovasi BERPENDAR menjadi salah satu inovasi pelayanan publik (dari 22 inovasi terpilih selama 10 tahun KIPP yang diselenggarakan Kementerian PANRB) dan menjadi *pilot project* dalam kegiatan Replikasi dan Perluasan (*Scale Up*) Inovasi Pelayanan

Tabel Rincian Kolaborasi Inovasi BERPENDAR

No	Nama Lintas Sektor	Tahun Fasilitasi	Jumlah UMK yang difasilitasi
1.	Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan (BRIH)	2020-2023	46
2.	Dinas Koperasi UKM DIY	2020-2024	179
3.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	2020-2024	101
4.	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	2022-2024	2
5.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	2020-2021	2
6.	Dinas Koperasi UKM Kab Kulon Progo	2022	10
7.	Dinas Perdagangan Perindustrian Kab Kulon Progo	2022-2023	10
8.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Sleman	2023-2024	10
9.	Dinas Perikanan dan Kelautan Kab Kulon Progo	2024	2
10.	Dinas Perikanan dan Kelautan Kab Bantul	2024	1
11.	PT. Sari Husada Generasi Mahardika, Tok	2021-2022	31
12.	PT. Tigaraksa Satria, Tok	2021-2022	2
Total			396



Penandatanganan komitmen untuk mereplikasi inovasi BERPENDAR pada acara Pencanaan dan Pemagangan Replikasi Inovasi Berpendar di Aula BBPOM Yogyakarta, Selasa (4/6/2024)

Publik Kementerian PANRB pada Juni 2024. Ada 20 UPT BPOM (antara lain Balai Besar POM di Medan, Makassar, Pekanbaru, dan Palembang) yang berkomitmen untuk melakukan replikasi Inovasi Berpendar.

Ke depannya, BPOM akan memperluas inovasi pada komunitas desa melalui Program BERPENDAR Masuk Desa. "Saya berharap komitmen mereplikasi tidak hanya simbolis

dituangkan dalam bentuk dokumen, namun juga dapat diimplementasikan secara nyata di wilayah kerja masing-masing UPT sehingga UMK di wilayah masing-masing dapat juga merasakan dampak yang sama dalam mendapatkan NIE dan meningkatkan daya saingnya," ungkap Sestama BPOM Rita Mahyona saat menghadiri Pencanaan dan Pemagangan Replikasi Inovasi Berpendar di Aula BBPOM di Yogyakarta, Selasa (4/6/2024). ■







Oleh : Jerry Voldo Febrian
Manurung
Editor : Dian Hermawati

Jangan Asal Jastip Makanan Viral, 1 Ton *Milk Bun* Asal Thailand Dimusnahkan

Jasa titip (jastip) pembelian barang dari luar negeri menjadi tren yang meningkat signifikan sejak masa pandemi hingga saat ini. Fenomena ini terjadi seiring peningkatan pergerakan lintas negara sejak dicabutnya status pandemi global oleh WHO.

Para pengguna jastip umumnya berasal dari kalangan muda yang *update* terhadap tren di dunia. Tren tersebut dapat berupa produk yang sedang populer di luar negeri, namun belum tersedia di dalam negeri atau sangat jarang dijual di Indonesia karena harga beli di luar negeri jauh lebih murah. Komoditi jastip yang populer antara lain kosmetik, barang elektronik, aksesoris, termasuk makanan dan minuman.

Makanan dan minuman adalah produk yang paling sering menjadi oleh-oleh dari perjalanan ke luar negeri, tetapi tidak semua barang titipan berakhir menjadi oleh-oleh. Beberapa orang menjadikan jastip sebagai bisnis dengan keuntungan yang lumayan.

Situs-situs penyedia jastip bisa dengan mudah dicari melalui mesin pencari Google. Situs tersebut juga seringkali mencantumkan testimoni untuk meyakinkan calon konsumen untuk memanfaatkan jastip yang ditawarkan. Prosedur pemesanan juga dirancah sangat sederhana, hanya dengan mengontak nomor WhatsApp dan memasukkan detail produk yang akan dibeli, selanjutnya transaksi dilakukan sesuai dengan harga barang yang dipesan, dan barang jastip siap dikirim ke alamat pemesannya.

Kemudahan mekanisme jastip ini menjadi salah satu penyebab masuknya produk ilegal ke Indonesia, termasuk produk makanan dan minuman ilegal. Produk ilegal berarti produk makanan dan minuman tersebut tidak memiliki izin

edar sebagaimana diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan BPOM Nomor 7 Tahun 2021. Produk tanpa izin edar (TIE) seperti ini tidak masuk dalam pengawasan BPOM dan tidak dapat dipastikan keamanannya.

Viralnya jastip *milk bun* vs regulasi pemasukan pangan dari luar negeri

Milk bun asal Thailand adalah sejenis roti sobek yang terbuat dari mentega dengan isian krim, yang ditaburi susu bubuk dan gula halus. Satu porsi *milk bun* berisi 6 potong roti yang memiliki beberapa variasi rasa. Roti ini diproduksi dan dirilis pertama kali pada 2018 oleh sebuah kafe bernama After You Dessert Cafe di Thailand.

Di Indonesia pada awal tahun 2024, terdapat tren memasukan roti *milk bun* dari Thailand melalui jastip. *Milk bun* ini menjadi viral setelah sejumlah artis dan selebgram memberikan testimoni mengenai kelezatannya. Akibatnya, banyak orang berbondong-bondong memburu makanan ini dan peluang bisnis *milk bun* kemudian ditangkap para pelaku jastip. Harga yang dibanderol untuk mendapatkan roti ini berkisar dari Rp250.000 ke atas. Walau mahal, tidak menyurutkan rasa penasaran para penikmatnya.

Sejatinya, membawa makanan dari luar negeri tidak dilarang. Namun, ada ketentuan yang harus ditaati oleh penumpang, jika tidak mau makanan

yang dibawa disita karena melanggar ketentuan. Sejak tahun 2008, BPOM telah mengatur pemasukan pangan olahan melalui Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.00.06.23.1456 Tahun 2008 tentang Pengawasan Pemasukan Pangan Olahan.

Selanjutnya, peraturan yang paling anyar diterbitkan pada 2023, yaitu Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia. Dalam peraturan tersebut diatur bahwa jumlah maksimum produk pangan yang dapat dibawa oleh penumpang adalah sejumlah maksimal 5 kilogram per orang. Apabila melebihi ketentuan tersebut, maka pihak berwajib akan melakukan penegakan terhadap kelebihan produk pangan yang dibawa penumpang. Tindak lanjut penegakan ini salah satunya adalah pemusnahan terhadap produk yang ditegah.

Koordinasi BPOM dengan Bea dan Cukai

Dalam rangka perlindungan terhadap konsumen, BPOM bersama dengan Bea dan Cukai berkoordinasi dalam menindaklanjuti tren peningkatan masuknya produk *milk bun* tanpa izin. Hal ini bertujuan melindungi masyarakat dari pangan yang belum dapat dibuktikan keamanannya.

Pangan olahan yang beredar di Indonesia, termasuk yang diperjualbelikan secara komersial melalui jastip, wajib mencantumkan izin edar sebagai bukti telah dievaluasi keamanan, mutu, dan gizinya. Tanpa izin edar, maka produk pangan akan



Produk Milk Bun sejumlah 2.664 buah (400 kg) yang berasal dari penegahan pihak Bea dan Cukai Soekarno-Hatta terhadap barang bawaan penumpang internasional selama bulan Februari 2024, akan dimusnahkan di Soekarno-Hatta pada 8 Maret 2024

dimusnahkan atau diekspor kembali ke negara asal.

Oleh karena itu, pada 8 Maret 2024, jajaran Bea dan Cukai Soekarno-Hatta yang dipimpin oleh Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta Gatot Sugeng Wibowo, bersama delegasi BPOM yang dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Didik Joko Pursito memusnahkan 2.664 buah pangan viral roti *milk bun* asal Thailand. Ditaksir bernilai 400 juta rupiah, ribuan *milk bun* tersebut merupakan hasil 33 penindakan terhadap barang bawaan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta selama Februari 2024. Tak hanya dimusnahkan di Soekarno-Hatta, kegiatan pemusnahan ribuan *milk bun* juga dilakukan secara serentak di Medan dan Surabaya.

Tips impor/pemasukan pangan olahan yang benar

Pemasukan pangan untuk keperluan

pribadi harus memenuhi ketentuan.

Oleh karena itu, masyarakat, dalam hal ini penumpang, harus memahami dan mengikuti ketentuan pada Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2023.

Apabila suatu produk makanan akan diperjualbelikan di dalam wilayah Indonesia, tentu saja pengimpor harus mengurus perizinan sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia. Salah satunya dengan mengurus izin edar produknya terlebih dahulu sebelum diimpor dan selanjutnya, setiap akan mengimpor wajib mengurus rekomendasi impor dari BPOM.

Jumlah *milk bun* Thailand yang dimusnahkan sedikit banyak menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih mudah tertarik dengan sesuatu hal yang viral, tanpa terlebih dahulu memastikan apakah barang viral tersebut telah mematuhi regulasi yang berlaku. Hal ini juga menunjukkan kecenderungan minat masyarakat Indonesia terhadap produk

makanan impor.

Tingginya minat masyarakat atas barang impor menjadi tantangan bagi eksistensi produsen lokal karena harus bersaing dengan produk asing untuk merebut pangsa pasar dalam negeri. Mengingat sektor industri makanan dan minuman adalah salah satu sektor padat karya, maka lesunya industri ini akan berpengaruh signifikan terhadap ketahanan ekonomi negara.

Untuk itu, regulasi pemasukan yang telah ada perlu terus diperkuat, termasuk untuk meningkatkan efektivitas implementasinya. Masyarakat juga harus terus dibina dan diedukasi sehingga keamanan pangan menjadi poin pertimbangan utama untuk memutuskan kelayakan konsumsi suatu produk pangan. Tak kalah penting, kita harus lebih mencintai produk dalam negeri yang juga sangat kaya dan beragam, sesuai dengan slogan Bangsa Buatan Indonesia. ■



Oleh : Randi Dian Saputra
Editor : Dian Hermawati

Ingin Cantik Malah Bikin Sick

Keinginan untuk mendapatkan perawatan kulit yang aman dan efektif seringkali mendorong masyarakat untuk mengunjungi klinik kecantikan, terutama untuk memanfaatkan jasa tenaga kesehatan profesional di dalamnya. Namun, pengawasan BPOM mengungkap fakta bahwa masih ada klinik kecantikan yang belum memenuhi memenuhi standar keamanan dan kesehatan sehingga berisiko menimbulkan efek negatif bagi para pelanggannya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu-pintu klinik kecantikan ini?

Peningkatan kebutuhan masyarakat akan produk perawatan kulit sejalan dengan tren untuk tampil menarik. Hal ini telah mendorong pesatnya pertumbuhan sarana distribusi kosmetik, termasuk klinik kecantikan. Klinik kecantikan adalah istilah populer untuk tempat yang menyediakan layanan estetika dan peningkatan penampilan. Keinginan untuk mendapatkan perawatan langsung dari tenaga kesehatan membuat banyak orang lebih memilih klinik kecantikan untuk perawatan kulit dan pembelian produk kosmetik.

Minat yang tinggi terhadap perawatan kulit di klinik kecantikan sebenarnya dapat mendukung peningkatan kesehatan masyarakat karena perawatan tersebut biasanya dilakukan oleh tenaga medis dengan produk yang sesuai kebutuhan. Namun, hasil pengawasan BPOM menunjukkan bahwa beberapa klinik kecantikan mengedarkan produk kosmetik yang tidak sesuai dengan ketentuan. Temuan ini mencakup kosmetik yang mengandung bahan terlarang, *skincare* beretiket biru yang tidak sesuai ketentuan, kosmetik tanpa izin edar, produk yang sudah kedaluwarsa, serta produk injeksi untuk tujuan memelihara kecantikan

Temuan Pelanggaran Kosmetik

Skincare beretiket biru adalah istilah untuk produk *skincare* yang mengandung bahan obat (keras) dan diberikan dengan resep/pengawasan dokter sebagai produk racikan. *Skincare* beretiket biru seharusnya bersifat personal, yang khusus disiapkan sesuai dengan diagnosis dokter kulit untuk pasiennya. Sayangnya, saat ini marak ditemui penjualan *skincare* beretiket biru yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga berpotensi merusak

TOTAL NILAI TEMUAN HASIL PENGAWASAN

Rp 2.804.818.000



Mengandung BB/OO

Rp 323.401.000



Skincare Etiket Biru Tidak Sesuai Ketentuan

Rp 170.416.000



Tanpa Izin Edar

Rp 1.727.178.000



Produk layanan yang diaplikasikan tidak sesuai ketentuan

Rp 121.517.000



Kedaluwarsa

Rp 463.806.000

Total nilai temuan kosmetik tidak memenuhi ketentuan hasil pengawasan BPOM periode 19-23 Februari 2024

kulit. *Skincare* beretiket biru yang tidak sesuai ketentuan tersebut mengandung bahan obat (keras), namun diberikan tanpa resep/pengawasan dokter atau dibuat sebagai produk racikan secara massal dan dijual secara online. Bahaya kesehatan dari penggunaan *skincare* jenis ini sangat serius dan sebanding dengan bahan obat keras yang dikandungnya, yaitu dapat menyebabkan berbagai efek samping dan komplikasi kesehatan.

Temuan BPOM lainnya yang sering didapat adalah kosmetik tanpa izin edar

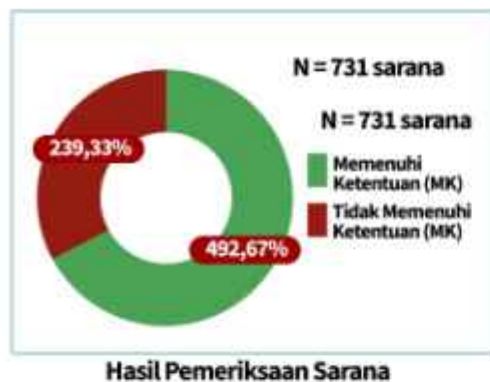
(TIE). Kosmetik TIE juga berisiko bagi kesehatan penggunaannya karena tidak dapat memberikan jaminan keamanan, manfaat, dan kualitas produknya. Produk yang sudah kedaluwarsa juga tidak dapat menjamin keamanan dan kualitasnya, sehingga penggunaannya sangat berisiko. Lebih berbahaya lagi, penggunaan produk yang didaftarkan sebagai kosmetik, namun diaplikasikan melalui injeksi karena dapat menyebabkan penyalahgunaan dan berujung pada risiko kesehatan yang signifikan bagi masyarakat.

Dari hasil pengawasan BPOM, ada beberapa jenis bahan dilarang yang ditemukan ditambahkan ke dalam kosmetik. Bahan dilarang tersebut antara lain:

 Dapat menyebabkan hiperpigmentasi, menimbulkan ochronosis (kulit berwarna hitamam), serta perubahan warna kornea dan bulu. Hydroquinon	 Dapat menyebabkan kulit kering, rasa terbakar, dan perubahan bentuk atau fungsi organ jaring (bersifat teratogenik). Asam retinoat	 Dapat menyebabkan iritasi kulit, salah satunya menimbulkan keluhan kulit mengupas. Klinda misin	 Dapat menyebabkan gatal, panas, pengupisan, dan kulit kering, timbul rambut bengkok atau menadang (folikulitis), perubahan warna kulit, dan pengerasan pada kulit. Fluo sinolon	 Dapat menyebabkan terjadinya bangkai, atropi kulit, perubahan karakteristik kelainan kulit, hipertensi, fotosensibilisasi, perubahan pigmen kulit, demutasi kontak, dan reaksi alergi. Steroid
---	---	---	--	---

Hasil Pengawasan:

PROFIL SARANA KLINIK KECANTIKAN YANG DIPERIKSA DAN TEMUAN PRODUK



Profil sarana klinik kecantikan dan temuan kosmetik tidak sesuai ketentuan hasil pengawasan BPOM 19-23 Februari 2024

seperti hiperpigmentasi, rasa terbakar, mengelupas, bahkan ada yang bersifat karsinogenik atau menyebabkan kanker.

Tidak hanya fokus pada produk kosmetik, BPOM juga melakukan pengawasan terhadap sarana peredaran kosmetik, salah satunya di sarana klinik kecantikan. Pada tahun 2024, klinik kecantikan menjadi sasaran dari intensifikasi pengawasan kosmetik yang dilakukan BPOM. Intensifikasi pengawasan dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia oleh 76 unit pelaksana teknis (UPT) BPOM pada tanggal 19-23 Februari 2024.

Pada intensifikasi pengawasan tersebut, dilakukan pemeriksaan terhadap 731 klinik kecantikan, dengan hasil 239 sarana (33%) dinyatakan tidak memenuhi ketentuan. Pelanggaran yang ditemukan berupa kosmetik mengandung bahan dilarang (5.937 *pieces*), *skincare* beretiket biru yang tidak sesuai ketentuan (2.475 *pieces*), kosmetik TIE (37.998 *pieces*), kedaluwarsa (5.277 *pieces*), dan produk yang didaftarkan sebagai kosmetik, namun diaplikasikan dengan cara injeksi (104 *pieces*). Nilai keekonomian berbagai temuan tersebut pun tidak main-main karena mencapai angka Rp2,8M.

Langkah Intervensi Agar Kosmetik Tak Sesuai Ketentuan Tertangani

Salah satu langkah yang dianggap cukup krusial untuk mengatasi masalah kosmetik yang tidak sesuai ketentuan adalah dengan meningkatkan pemahaman, baik kepada pelaku usaha maupun masyarakat sebagai konsumen. BPOM melakukan pembinaan kepada pelaku usaha dan asosiasi profesi terkait agar lebih memahami pentingnya

mematuhi peraturan dan menjaga kualitas produknya. Selain itu, BPOM juga aktif melakukan edukasi agar masyarakat lebih waspada dan cerdas dalam memilih produk kosmetik, sekalipun kosmetik diperoleh dari sarana klinik kecantikan.

Salah satu bentuk edukasi yang dilakukan BPOM adalah melalui pemaparan Hasil Intensifikasi Pengawasan Kosmetik pada Klinik Kecantikan pada 3 April 2024. Dalam kegiatan tersebut, BPOM memberikan informasi kepada media dan masyarakat mengenai potensi bahaya dari penggunaan kosmetik termasuk *skincare* beretiket biru tidak sesuai ketentuan yang ditemukan dari hasil intensifikasi pengawasan.

Intensifikasi pengawasan juga merupakan langkah kunci yang dilakukan BPOM setiap tahun. Pengawasan ini dilakukan secara tematik, mengikuti tren pelanggaran kosmetik yang terjadi di pasaran. "Melalui pengawasan yang lebih intensif dan terarah, diharapkan pelanggaran dalam peredaran kosmetik dapat diminimalisir. BPOM juga tidak segan menegakkan hukum terhadap pelanggaran yang ditemukan dengan tujuan melindungi kesehatan masyarakat dan memastikan hanya produk kosmetik yang aman dan berkualitas yang beredar di pasaran," tegas Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Mohamad Kashuri.

Sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran peredaran kosmetik dapat berupa sanksi administratif, yaitu peringatan, penarikan, pemusnahan, penghentian sementara kegiatan, dan pencabutan nomor izin edar. Apabila ditemukan pelanggaran berulang, maka

akan ditindaklanjuti dengan langkah pro-justitia. Pemberian sanksi ini sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika.

Apabila dalam pelanggaran tersebut diketahui adanya keterlibatan profesi kesehatan, maka BPOM juga berkoordinasi aktif dengan asosiasi profesi kesehatan, yaitu Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), dan Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia (PERDOSKI). Upaya ini dilakukan agar asosiasi profesi dapat memberikan pembinaan serta sanksi terhadap anggotanya yang melakukan pelanggaran di bidang kosmetik. Koordinasi ini ke depannya juga akan lebih diperkuat lagi.

BPOM juga selalu melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetik tidak memenuhi ketentuan yang beredar secara *online* melalui patroli siber. Selama tahun 2023 hingga Februari 2024, BPOM telah melakukan pemblokiran terhadap 108.141 tautan penjualan produk kosmetik ilegal dan/atau mengandung bahan dilarang/berbahaya dengan nilai keekonomian sebesar Rp1,2 T.

Kerja sama antara BPOM, pelaku usaha, dan masyarakat menciptakan simbiosis yang saling menguntungkan. BPOM menjamin keamanan produk beredar melalui kebijakan dan pengawasan yang dilakukan, pelaku usaha mematuhi regulasi yang berlaku, dan masyarakat turut aktif untuk lebih cermat memilih produk. Sinergi ini memastikan produk kecantikan yang beredar aman sehingga dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. ■



PLBN Aruk, gerbang negara yang menghubungkan Indonesia dan Malaysia, (3/6/2021). Pos ini berada di Desa Sebunga, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, berdekatan langsung dengan Kota Singkawang.



Potret Perbatasan Darat Indonesia - Malaysia

Penulis : Benny Robin
Editor : Fathan Nur Hamidi

Aruk, Kalimantan Barat

Sahabat BPOM, BPOM memiliki peran krusial dalam mengawasi masuknya produk obat dan makanan ke Indonesia. Dengan fokus pada penegakan standar keamanan dan kepatuhan terhadap regulasi, BPOM bertindak untuk melindungi masyarakat dari produk yang tidak aman atau ilegal. Pengawasan yang ketat ini berorientasi pada kesehatan masyarakat sekaligus mendukung perdagangan yang adil dan berkelanjutan di wilayah perbatasan.

Di sela tugasnya meliput kegiatan pimpinan, Tim MaPOM berkesempatan menjelajah perbatasan. Mengabadikan ragam kondisi perbatasan darat Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Malaysia. Salah satunya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, di Desa Sebunga Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

Menggunakan kendaraan roda empat, kami menempuh perjalanan kurang lebih 7 jam dari Kota Pontianak. Disambut

bangunan megah, dari kejauhan tampak tulisan "PLBN Aruk" bercorak warna merah putih. Arsitektur bangunan mengadopsi Rumah Panjang lengkap dengan ukiran khas rumah tradisional Suku Dayak.

Keberadaan PLBN Aruk ini telah menjadikan Desa Sebunga menjadi destinasi wisata perbatasan yang menarik banyak orang untuk berkunjung, baik untuk bepergian ke negara Malaysia atau sekedar menikmati suasana perbatasan negara Indonesia-Malaysia. Penduduk sekitar menjajakan dagangan khas Kalimantan Barat dan tidak jarang juga menawarkan penukaran uang ringgit kepada pendatang.

Unit pelaksana teknis (UPT) BPOM yang berada di wilayah Kalimantan Barat di antaranya Balai Besar POM di Pontianak, Loka POM di Sambas, dan Loka POM di Sanggau yang terletak tidak jauh dari PLBN Entikong.



Ikón Garuda berdiri tegak di PLBN Aruk, (3/6/2021).

Berdekatan langsung dengan Kota Singkawang yang merupakan ikon wisata Kalimantan Barat, PLBN Terpadu Aruk ini memiliki potensi sebagai pintu masuk wisata bagi negara tetangga ke Indonesia.



Pos POM Aruk yang terletak tidak jauh dari PLBN Aruk (3/6/2021). Kini sudah naik tingkat menjadi Loka POM di Kab. Sambas. UPT BPOM di perbatasan Malaysia berperan penting dalam mengawasi produk obat dan makanan yang masuk ke wilayah Indonesia.

Sebatik, Kalimantan Utara

Menuju tapal batas Indonesia di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara, Tim MaPOM harus menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam menggunakan kapal cepat dari Pelabuhan Tengku, Kota Tarakan, setelah sebelumnya terbang menggunakan pesawat dari Jakarta, (23/3/2022). Dalam perjalanan pemandangan didominasi oleh pepohonan bakau. Tak jarang, tongkang-tongkang pengangkut batu bara lalu lalang.

Tahun 2022 lalu, BPOM di Tarakan diresmikan. Oupkan wilayah kerja BPOM di Tarakan mencakup Provinsi Kalimantan Utara yang terdiri dari 6 kabupaten/kota dengan luas wilayah ± 76.467,70 km² dan jumlah penduduk 701.814 jiwa. Dengan jumlah sarana produksi dan distribusi obat dan makanan yang diawasi sebanyak 2.847 sarana. ■



Tugu Perbatasan Garuda Perkasa berada di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (23/3/2022). Tugu ini berbentuk Burung Garuda yang sedang menggigit bendera Merah Putih ditambah tulisan "NKRI Harga Mati", semakin terdapat nasionalisme yang digaungkan di wilayah perbatasan tersebut.



Kapal cepat sedang melaju menuju Pulau Sebatik (23/3/2022). Kurang lebih 2 jam perjalanan dari Pelabuhan Tengku, Kota Tarakan.



Wilayah Tawau di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara memiliki aliran sungai yang sering digunakan untuk keluar masuk barang dari Malaysia ke Indonesia (23/3/2022).



Kemana Pangan Olahanmu Harus Didaftarkan?

Setiap pangan olahan baik yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan, **WAJIB** memiliki izin edar.

Dasar Hukum:

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
- Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2023 tentang Registrasi Pangan Olahan
- Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga

Daftarnya Kemana?

Pemerintah Kabupaten/Kota	BPOM
SPP - IRT	BPOM RI MD/ML
1. Tempat usaha di rumah tinggal dan/atau rumah toko yang ditinggali oleh pemilik industri rumah tangga pangan 2. Diproduksi menggunakan peralatan manual hingga semi otomatis 3. Jenis pangan olahan mengacu pada lampiran Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga 4. Nomor PB-UMKU diawali dengan P-IRT terdiri dari 15 digit sebagai berikut: P-IRT No. 1234567890123-45 5. Masa berlaku 5 tahun	1. Lokasi produksi terpisah dengan rumah tangga 2. Pangan olahan diproduksi secara manual, semi otomatis, otomatis atau dengan teknologi tertentu seperti UHT, pasteurisasi, <i>retort</i> 3. Seluruh jenis pangan olahan 4. Peraturan teknis mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Registrasi Pangan Olahan 5. Nomor PB-UMKU diawali dengan MD/ML terdiri dari 15 digit sebagai berikut: BPOM RI MD/ML 123456789012345

Jenis Pangan yang tidak dapat didaftarkan SPP-IRT

1. Bahan tambahan pangan (BTP)
2. Bahan penolong
3. Pangan olahan wajib standar nasional Indonesia (SNI) air mineral alami, air mineral, air demineral, air minum embun, garam konsumsi beryodium, minyak goreng sawit, kopi instan, tuna dalam kemasan kaleng, sarden dan makarel dalam kaleng, tepung terigu sebagai bahan makanan, gula kristal putih, kakao bubuk
4. Pangan olahan yang diproduksi menggunakan peralatan selain manual atau semi otomatis contoh: pangan olahan dengan sterilisasi komersial, UHT, pasteurisasi, dan lain-lain
5. Pangan olahan dengan penanganan khusus, baik dalam produksi maupun rantai distribusi contoh: pangan olahan dengan dengan proses pembekuan atau distribusi dalam rantai dingin
6. Pangan olahan yang mencantumkan klaim
7. Pangan untuk keperluan gizi khusus (PKGK) contoh: formula bayi, pangan untuk diet khusus, pangan untuk penyandang diabetes, pangan untuk olahragawan, dan lain-lain
8. Minuman beralkohol



Jenis Pangan yang tidak wajib didaftarkan BPOM (MD/ML)

1. Pangan olahan yang mempunyai masa simpan kurang dari 7 (tujuh) hari
2. Pangan olahan yang digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku pangan dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir
3. Pangan olahan dan BTP yang dikemas dalam jumlah besar dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir
4. Pangan olahan yang termasuk barang kebutuhan pokok hasil industri yang lazim dikemas kembali dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan yang meliputi gula kristal putih, minyak goreng, dan tepung terigu
5. Pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
6. Pangan olahan yang diimpor dalam jumlah kecil untuk keperluan sampel dalam rangka pengujian, penelitian, dan/atau konsumsi sendiri
7. Pangan siap saji;
8. Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan



..urus izin edar produk pangan olahanmu untuk tingkatkan daya saing..



Selamat Hari
**Keamanan
Pangan
Sedunia**

7 JUNI 2024

**Keamanan Pangan
Tanggung Jawab**

Kita Bersama

Illustrator : Mochamad Rahardi Putranto
Editor : Fathan Nur Hamidi